



ISBN. 979-598-144-7

04410-9526

SERI H.13

**SENSUS PERTANIAN 1993**

**ANALISIS PROFIL RUMAHTANGGA  
PERTANIAN**

**PROPINSI JAWA TIMUR**

*BIRO PUSAT STATISTIK* **BPS** *JAKARTA-INDONESIA*

**SENSUS PERTANIAN 1993**

**ANALISIS PROFIL RUMAHTANGGA  
PERTANIAN**

**PROPINSI JAWA TIMUR**

# **ANALISIS PROFIL RUMAHTANGGA PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR**

**No Katalog**

**ISBN 979-598-144-7**

**No Publikasi 04410-9526**

**Naskah**

**Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur**

**Gambar Kulit**

**Bagian Analisis dan Pengembangan Statistik Ekonomi, BPS**

**Diterbitkan**

**Biro Pusat Statistik**

**Dicetak oleh**

**Percetakan CV Nurwita Karya Indah**

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN**  
**ANALISIS PROFIL RUMAHTANGGA PERTANIAN 1993**  
**PROPINSI JAWA TIMUR**

- PENGARAH : - SOEWONDO HARDJOPAWIRO, Msc.  
(KS. PROPINSI JAWA TIMUR)
- NARA SUMBER : - PRIYONO, MA.  
(KS. PROPINSI JAWA TIMUR)
- EDITOR DAERAH : - BAMBANG HERU SANTOSA, SE, MEC.  
(KS. PROPINSI JAWA TIMUR)
- PENULIS . - Drs. SUNJOTO SADELI  
(KS. PROPINSI JAWA TIMUR)
- Ir. POTRO KUMOLO  
(KS. PROPINSI JAWA TIMUR)
- Ir. DJOKO SANTOSO  
(KS. PROPINSI JAWA TIMUR)
- DODO SARWANTO, SS1  
(KS PROPINSI JAWA TIMUR)
- BAMBANG IRAWAN HADI, BSt.  
(KS. PROPINSI JAWA TIMUR)
- MARIA ENNY MARTHARACHMI, SE  
(KS. PROPINSI JAWA TIMUR)

## KATA PENGANTAR

Analisis Pendahuluan Sensus Pertanian 1993 ini merupakan analisis sederhana dari hasil Pendaftaran Rumahtangga pada Sensus Pertanian 1993. Analisis ini diharapkan dapat menunjang pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan, dan perencanaan dibidang pertanian. Dari analisis ini juga diharapkan diperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan pengumpulan data statistik pertanian dimasa yang akan datang.

Karena keterbatasan informasi yang dikumpulkan melalui pendaftaran rumahtangga, analisis yang lebih mendalam belum bisa dilakukan. Analisis ini hanya terbatas pada analisis profil usaha rumahtangga pertanian, yang antara lain mencakup pola sebaran usaha rumahtangga pertanian antar propinsi, jenis usaha pertanian yang banyak diminati di masing-masing propinsi, penguasaan tanah, perkembangan usaha rumahtangga dan populasi tanaman atau ternak.

Kegiatan penulisan dilakukan sepenuhnya oleh staf Kantor Statistik Propinsi dengan bantuan konsultasi dari BPS dan Tim pengarah dari Kantor Statistik Propinsi, Bappeda setempat dan Instansi terkait. Draft analisis diedit oleh editor dari BPS Pusat. Penulisan analisis ini merupakan suatu langkah konkrit dalam rangka pembinaan tenaga analisis BPS ditingkat daerah.

Analisis ini disadari masih mengandung banyak kelemahan baik yang berkaitan dengan teknik penulisan, teknik analisis, maupun tampilannya. Namun demikian sebagai awal dari proses pelatihan, hasil yang ditunjukkan pada tahap ini cukup menggembirakan. Saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan sangat diharapkan.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga terwujudnya publikasi ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Maret 1995

Biro Pusat Statistik

Kepala,



Sugito

Nip.340000452

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR . . . . .	11
DAFTAR ISI . . . . .	1V
DAFTAR TABEL . . . . .	v11
BAB I. PENDAHULUAN . . . . .	1
1.1. Latar Belakang . . . . .	1
1.2. Tujuan dan Cakupan Analisis . . . . .	5
1.3. Sumber Data dan Konsep Definisi . . . . .	6
1.4. Metodologi dan Sistematika Penulisan . . . . .	8
BAB II. GAMBARAN UMUM RUMAHTANGGA USAHA PERTANIAN . . . . .	12
2.1. Profil Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan Tahun 1993 . . . . .	12
2.1.1. Distribusi Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kabupaten dan Jenis Usaha Pertanian Tahun 1993 . . . . .	12
2.1.2. Penguasaan Lahan Pertanian . . . . .	17
2.2. Perkembangan Rumahtangga Pertanian . . . . .	20
2.2.1. Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan . . . . .	21
2.2.2. Jenis Usaha Rumahtangga Pertanian Bukan Pengguna Lahan . . . . .	23

BAB III. GAMBARAN UMUM RUMAHTANGGA BUKAN USAHA PERTANIAN	
1993 . . . . .	40
3.1. Rumahtangga Kuasa Usaha Pertanian Menurut Daerah	40
3.2. Rumahtangga yang Berusaha di Bidang Pengolahan Hasil Pertanian . . . . .	41
3.3. Rumahtangga Buruh Tani . . . . .	42
 BAB IV. USAHA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA . . . . .	 45
4.1. Rumahtangga Usaha Tanaman Padi/palawija dan Hortikultura . . . . .	 46
4.2. Populasi dan Luas Tanaman Hortikultura . . . . .	48
4.3. Luas Lahan Sawah per Rumahtangga Padi/Palawija	50
4.4. Perkembangan Rumahtangga Usaha Tanaman Padi/Palawija . . . . .	 51
 BAB V. USAHA PETERNAKAN RAKYAT . . . . .	 59
5.1. Perkembangan Rumahtangga Usaha Peternakan Rakyat	60
5.2. Perkembangan Populasi Ternak/Unggas . . . . .	64
 BAB VI. USAHA PERKEBUNAN RAKYAT . . . . .	 77
6.1. Rumahtangga Usaha Perkebunan Rakyat . . . . .	78
6.2. Perkembangan Jumlah Pohon . . . . .	81



BAB VII. USAHA PERIKANAN . . . . .	88
7.1. Rumahtangga Usaha Budidaya Ikan di Kolam Air Tawar/Sawah . . . . .	88
7.2. Rumahtangga Budidaya Ikan di Tambak Air Payau .	89
7.3. Perkembangan Rumahtangga Usaha Penangkapan Ikan Laut dan Perairan Umum 1983-1993 . . . . .	90
 BAB VIII. RINGKASAN DAN KESIMPULAN . . . . .	 95

<https://jatim.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Rumahtangga, Rumahtangga Pertanian, dan Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan (PPL) Menurut Kabupaten, Tahun 1993	26
Tabel 2.2	Persentase Rumahtangga Pertanian Terhadap Rumahtangga, Rumahtangga PPL Terhadap Rumahtangga Pertanian, Tahun 1993	27
Tabel 2.3	Persentase Rumahtangga, Rumahtangga Pertanian dan Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kabupaten, Tahun 1993	28
Tabel 2.4	Persentase Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kabupaten dan Jenis Usaha Pertanian 1993	29
Tabel 2.5	Ratio Rumahtangga PPL Per Jenis Usaha Pertanian Terhadap Total Rumah Tangga PPL, Tahun 1993	30
Tabel 2.6	Persentase Rumahtangga PPL Menurut Golongan dan Rata-rata Luas Tanah yang Dikuasai, Tahun 1993	31
Tabel 2.7	Persentase Luas yang Dikuasai Rumahtangga PPL Menurut Kabupaten dan Status Penguasaan Tanah, Tahun 1993	32
Tabel 2.8	Pertumbuhan Rumahtangga Pertanian Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya), Tahun 1983 - 1993	33
Tabel 2.9	Pertumbuhan Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya) Tahun 1983 - 1993	35
Tabel 2.10	Rata-rata Luas Lahan yang Dikuasai Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya) Tahun 1983-1993	36
Tabel 2.11	Jumlah Rumahtangga Pertanian yang Tidak Menggunakan Lahan Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Usaha Pertanian	37
Tabel 2.12	Persentase Rumahtangga Pertanian yang Tidak Menggunakan Lahan Terhadap Rumahtangga Pertanian Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Usaha Pertanian 1993	38

Tabel 2.13	Persentase Rumahtangga Pertanian yang Tidak Menggunakan Lahan Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Usaha Pertanian, Tahun 1993	39
Tabel 3	Jumlah Rumahtangga yang Menjadi Kuasa Usaha, Pengolahan Hasil Pertanian, dan Buruh Pertanian Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya) 1993	44
Tabel 4.1	Jumlah Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan yang Mempunyai Usaha Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman, Tahun 1993	54
Tabel 4.2	Persentase Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan yang Mempunyai Usaha Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman, Tahun 1993	55
Tabel 4.3	Jumlah Pohon/Rumpun/Luas Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Tanaman, Tahun 1993	56
Tabel 4.4	Rata-rata Luas Lahan Sawah per Rumahtangga Padi dan Palawija Menurut Kabupaten, Tahun 1993	57
Tabel 4.5	Perkembangan Rumahtangga Usaha Tanaman Pangan Padi/Palawija, Tahun 1983 - 1993	58
Tabel 5.1	Perkembangan Rumahtangga Usaha Peternakan Rakyat Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) Tahun 1983-1993	70
Tabel 5.2	Perkembangan Rumahtangga Usaha Ternak Besar Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Ternak, Tahun 1983-1993	71
Tabel 5.3	Perkembangan Rumahtangga Usaha Ternak Kecil Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Ternak, Tahun 1983-1993	72
Tabel 5.4	Perkembangan Rumahtangga Usaha Unggas Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Unggas Tahun 1983-1993	73
Tabel 5.5	Perkembangan Populasi Ternak Besar Menurut Satuan Wilayah Pembangunan dan Jenis Ternak 1983 - 1993	74
Tabel 5.6	Perkembangan Populasi Ternak Kecil Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Ternak, Tahun 1983-1993	75
Tabel 5.7	Perkembangan Populasi Unggas Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Ternak, Tahun 1983-1993	76

Tabel 6.1	Rumahtangga Usaha Perkebunan Rakyat Menurut SWP (Tanpa Kotamadya), Tahun 1993	83
Tabel 6.2	Perkembangan Rumahtangga Perkebunan Rakyat Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Tanaman, Tahun 1983-1993	84
Tabel 6.3	Perkembangan Jumlah Pohon Menurut SWP (Tanpa Kota madya) dan Jenis Tanaman Tahun 1983-1993	86
Tabel 7.1	Luas dan Rata-rata Luas Kolam Air Tawar/Sawah yang Dikuasai Rumahtangga Budidaya Ikan Menurut Kabupaten, Tahun 1993	92
Tabel 7.2	Luas dan Rata-rata Luas Tambak Air Payau yang Dikuasai Rumahtangga Budidaya Ikan Menurut Kabupaten, Tahun 1993	93
Tabel 7.3	Perkembangan Rumahtangga Nelayan Penangkap Ikan Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) Tahun 1983-1993	94

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Propinsi Jawa Timur terletak antara  $111^{\circ}$  dan  $114^{\circ}4'$  bujur timur dan antara  $7^{\circ}12'$  dan  $8^{\circ}48'$  lintang selatan. Propinsi seluas  $47\,921,98\text{ km}^2$  ini mempunyai ketinggian antara 2 meter (Surabaya) dan 445 meter (Malang). Situasi geografis tersebut memberikan rentang temperatur udara antara  $20,8^{\circ}\text{C}$  dan  $35^{\circ}\text{C}$ , serta kelembaban nisbi antara 36 persen dan 99 persen.

Secara kuantitatif, luas Propinsi Jawa Timur relatif lebih sempit dibanding propinsi-propinsi lain, seperti Irian Jaya, propinsi-propinsi di Kalimantan, dan di Sumatera. Namun melihat lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, Propinsi Jawa Timur mempunyai sumber daya yang relatif cukup baik. Demikian juga mengenai teknologi yang digunakan untuk melakukan budidaya pertanian, propinsi di ujung timur Pulau Jawa ini dapat dikatakan mempunyai tingkat yang relatif tinggi, dengan ditunjang oleh kondisi iklim yang menguntungkan, memungkinkan propinsi Jawa Timur mampu berperan sebagai penyumbang produk pertanian bagi kepentingan nasional. Angka-angka dari Statistik Indonesia 1993 dan dari Jawa Timur Dalam Angka 1992 membuktikan keadaan ini.

Dari 11 820 180 ha tanah tegalan/ladang yang digunakan untuk usaha pertanian di Indonesia, 1 191 985 ha (1,62 persen) berada di Jawa Timur. Usaha perikanan tambak juga merupakan terluas kedua setelah Propinsi Sulawesi Selatan. Demikian juga luas sawah, setelah Propinsi Jawa Barat sebagai propinsi yang mempunyai lahan sawah terluas, Propinsi Jawa Timur mempunyai 1 172 337 ha sawah.

Namun demikian, kenyataan secara umum, luas lahan pertanian - seiring dengan kegiatan pembangunan ekonomi - terus menurun dari tahun ke tahun.

Tingkat keunggulan Jawa Timur dalam bidang pertanian ditunjukkan oleh tingkat produktifitasnya, yang secara rata-rata Indonesia lebih tinggi. Rata-rata produksi padi per hektar pada tahun 1991 adalah 5250 kg, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4447 kg, dan merupakan tingkat produktifitas tertinggi diantara yang dicapai 27 propinsi di Indonesia. Tingkat produktifitas yang tinggi diantaranya disebabkan oleh prasarana produksi yang memadai. Dari luas sawah yang ada, 88 persen merupakan tanah sawah yang beririgasi teknis dan setengah teknis. Hal yang sama ditunjukkan oleh tingkat produktifitas jagung per hektar.

Dalam bidang produksi ternak, sayuran, dan buah-buahan, Propinsi Jawa Timur juga merupakan penyumbang terbesar untuk keperluan nasional. Bahkan baik dari segi budidaya ternak maupun dari segi pemotongannya, Jawa Timur merupakan pemasok daging sapi terbesar di Indonesia, demikian juga mengenai ternak sapi perah.

Dari kenyataan yang telah disebut sekilas, peranan sektor pertanian dalam perekonomian Jawa Timur masih sangat dominan, walaupun dapat diprediksi bahwa beberapa tahun mendatang sektor industri sudah akan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian. Angka-angka Produk Domestik Bruto (PDRB) sektoral memberi indikasi bahwa atas dasar harga berlaku, sektor pertanian mempunyai andil sebesar 23,27 persen. Sedangkan menurut harga

konstan 1983, peranan sektor pertanian Jawa Timur adalah sebesar 23,60 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perkembangan harga produk pertanian termasuk relatif lambat.

Dibalik cerahnya gambaran sektor pertanian di Jawa Timur, masalah yang menghambat pengembangannya juga belum sepenuhnya teratasi. Dua masalah yang umum dialami sektor pertanian adalah gencarnya pengembangan usaha di sektor sekunder dan sektor tersier yang memang juga merupakan usaha yang terus didorong oleh pemerintah dan berakibat menggeser sumber daya pertanian, dan masalah harga produk pertanian yang, walaupun merupakan kebutuhan vital masyarakat, kurang mempunyai nilai tukar relatif baik dibanding nilai tukar produk sektor-sektor sekunder dan tersier. Luas lahan sawah terus menurun dari 1 612 525 ha pada tahun 1989 menjadi 1 450 375 ha pada tahun 1993, demikian juga lahan untuk usaha pertanian lainnya. Disamping permasalahan tersebut, seperti sektor-sektor lainnya, sektor pertanian juga sarat dengan masalah ketenagakerjaan.

Rendahnya nilai tukar dapat dilihat dari data indeks harga dan indeks indeks pada angka PDRB. Data hitungan Biro Pusat Statistik yang dipublikasi melalui Buletin Ringkas (Oktober 1994) menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar petani pada tahun 1992, 1993, dan 1993 masih di bawah angka 100. Angka indeks ini membuktikan bahwa produk-produk non-pertanian yang dibeli oleh petani, terutama produk industri (pupuk, pestisida), mempunyai laju kenaikan harga yang relatif lebih menguntungkan produsen. Hal ini juga berkenaan dengan pengurangan atau bahkan penghapusan

subsidi pupuk dan pestisida dari pemerintah. Pernyataan ini juga didukung oleh kenyataan, bahwa peranan nilai tambah sektor pertanian atas dasar harga konstan 1993 lebih besar dibanding nilai tersebut atas dasar harga berlaku. Perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai riil produk pertanian lebih besar dibanding nilai nominalnya. Rendahnya nilai tukar menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam mengurangi atau mencabut subsidiya sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Masalah lainnya adalah masalah ketenagakerjaan. Gejala umum yang terjadi adalah belum tercapainya *equilibrium* antara pasokan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja oleh sektor-sektor produksi. Persoalannya bukan terletak pada kuantitas pasokan, namun lebih pada kesesuaian kualifikasi tenaga kerja. Akibat yang terjadi adalah masih terdapat pengangguran. Orang-orang yang kurang beruntung memperoleh pekerjaan di sektor non-pertanian akhirnya terjun ke dalam sektor pertanian sebagai petani yang bukan profesional. Kenyataan ini dapat terjadi karena sektor pertanian tradisional seolah-olah tidak mensyaratkan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi dan dapat "dimasuki" oleh *supply* tenaga kerja yang tidak terserap di sektor lain. Masalah ini membuat produktifitas per tenaga kerja di sektor pertanian kurang dapat dipacu.

Pemerintah secara nyata dari Pelita ke Pelita terus berusaha mengembangkan sektor pertanian. Dalam usahanya tersebut, berbagai kiat dilaksanakan. Relevan dengan usaha tersebut, penyediaan data tentang sektor pertanian sangat diperlukan,



sehingga penulisan Analisis Profil Rumahtangga Pertanian 1993 Propinsi Jawa Timur mempunyai tingkat urgensi yang tinggi. Rangkaian analisa ini akan semakin bermanfaat apabila seluruh hasil Sensus Pertanian 1993 (ST-93) selesai diolah.

Semua informasi tentang sektor pertanian dalam konteks pembangunan nasional dianggap masih relevan. Walaupun kontribusi sektor ini terhadap perekonomian cenderung semakin menurun dari waktu ke waktu, namun dalam jangka menengah peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia masih cukup tinggi dalam dua hal pokok besaran nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Dalam kaitan ini, data tentang sektor pertanian dapat digunakan sebagai bahan baku analisis dan penyusunan perencanaan pembangunan di sektor pertanian.

## **1.2. Tujuan dan Cakupan Analisis**

Analisis (ST-93) pendahuluan yang disajikan dalam buku ini dimaksudkan untuk membahas profil rumahtangga pertanian pengguna lahan secara umum, dan untuk melihat perkembangan usaha pertanian di Propinsi Jawa Timur antara tahun 1983 dan 1993 (tahun-tahun dilaksanakan Sensus Pertanian yang ke dua dan ke tiga). Selain itu analisis menyajikan pula informasi lain dari hasil pencacahan rumahtangga pertanian yang mencakup jumlah rumahtangga lapisan bawah, seperti petani gurem, buruh tani, pemburu satwa liar, dan nelayan.

Keterbatasan topik bahasan yang disajikan didasarkan kepada data acuan yang sebagian besar dari hasil olahan dokumen ST'93-L

(pencacahan rumahtangga pertanian) Perubahan jumlah rumahtangga pertanian tidak harus menunjukkan suatu kemajuan atau kemunduran di sektor pertanian. Bertambahnya jumlah rumahtangga pertanian mungkin malah dapat menunjukkan kurang berkembangnya sektor tersebut, karena rumahtangga-rumahtangga baru secara terpaksa bekerja di sektor pertanian disebabkan tidak tertampung di sektor lain. Demikian juga tentang bertambahnya jumlah rumahtangga yang bergerak dalam jasa pertanian, belum tentu menunjukkan semakin majunya usaha jasa pertanian. Keterbatasan-keterbatasan ini menyebabkan analisa sederhana ini tidak dapat mengungkap secara menyeluruh tentang gambaran di sektor ini.

Walaupun terdapat data dari pencacahan rumahtangga pertanian daerah kotamadya, namun dalam analisa ini titik fokus bahasan adalah pada data daerah kabupaten, dan untuk ukuran-ukuran tertentu disajikan dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) tanpa kotamadya. Kecilnya peranan rumahtangga pertanian di daerah kotamadya dalam perekonomian mendasari titik fokus analisis ini. Data yang disajikan merupakan hasil *blow up* dari hasil listing rumahtangga yang merupakan perkiraan populasi (menggunakan faktor pengali tertentu). Faktor pengali ditentukan oleh besarnya populasi dan sampel yang diambil. Sedangkan ruang lingkup geografis yang masuk dalam cakupan analisis ini adalah khusus untuk wilayah Propinsi Jawa Timur.

### **1.3. Sumber Data dan Konsep Definisi**

Sebagian besar data yang menjadi bahan analisis berasal dari

kegiatan Sensus Pertanian 1993, namun sebagai bahan bandingan juga digunakan data dari hasil Sensus Pertanian 1983. Data dari sumber di luar Sensus Pertanian juga digunakan sebagai pendukung analisis.

Pengumpulan data pada Sensus Pertanian 1993 menggunakan pendekatan wilayah yang disebut wilayah pencacahan, suatu daerah yang mempunyai batas-batas yang jelas dan diperkirakan dapat bertahan selama 10 tahun. Di dalam suatu wilayah pencacahan terdapat sekitar 200 sampai dengan 300 rumahtangga atau bangunan fisik. Maksud dari pembatasan wilayah pencacahan adalah untuk memudahkan petugas lapangan dalam melaksanakan tugasnya, disamping digunakan sebagai kerangka penarikan sampel untuk keperluan survei-survei lanjutan. Wilayah pencacahan ini dibentuk sepuluh tahun sekali menjelang Sensus Penduduk.

Untuk keperluan Sensus Pertanian 1993, *updating* wilayah pencacahan dilakukan pada bulan Agustus 1993, yaitu sebesar 20 persen dari jumlah keseluruhan di kabupaten daerah pedesaan dan daerah potensi pertanian di kotamadya dan ibukota provinsi.

Sumber data utama dari ST-93 untuk analisis yang dilakukan adalah hasil cacahan dengan menggunakan Daftar ST93-L. Hasil pengolahan daftar ini menginformasikan tentang jumlah seluruh rumahtangga, jumlah rumahtangga pertanian, jumlah rumahtangga pertanian pengguna lahan, dan jumlah rumahtangga pertanian pengguna lahan yang terpilih untuk diteliti lebih lanjut dalam rangkaian Proyek Sensus Pertanian 1993. Dari data jumlah lahan, selanjutnya diperoleh pula jenis dan kuantitas tanaman yang

diusahakan Pada blok yang lain, Daftar ST93-L menjangring informasi tentang pembudidayaan ternak, sedangkan pada blok terakhir, dapat diperoleh data luas lahan yang dikuasai

Untuk memperoleh keterbandingan yang baik atas konsep dan definisi yang digunakan dalam dua sensus pertanian tersebut penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam dua sensus itu berbeda Sebagai contoh, usaha budidaya ikan/biota lain di laut, dalam ST-93 termasuk jenis usaha yang dicacah dalam kegiatan sensus, namun jenis usaha tersebut tidak termasuk yang dicacah dalam kegiatan ST'83 Perbedaan-perbedaan juga menyangkut batasan usaha dan lainnya Oleh karena itu untuk melakukan analisa banding antara hasil dua sensus tersebut harus terlebih dahulu dilakukan penyesuaian definisi pada angka-angka yang ditabulasikan Secara lengkap perbedaan batasan/definisi yang digunakan ditabulasikan dalam Lampiran Data yang disajikan dalam tabel-tabel analisis telah melalui penyesuaian sehingga keterbandingan data dari dua sensus tersebut telah diperoleh

#### **1.4. Metodologi dan Sistematika Penulisan**

Metoda analisis yang digunakan dalam penulisan bersifat deskriptif Analisis dilakukan dengan cara mengamati penyebaran rumahtangga pertanian menurut jenis usaha, penguasaan lahan dan faerah kabupaten Selain itu perbandingan juga dilakukan, baik secara vertikal (perbandingan antar subsektor) maupun secara

perbandingan horizontal (perbandingan peubah-peubah antar kabupaten) Untuk analisa perkembangan antar sensus (Sensus Pertanian 1993 dan Sensus Pertanian 1983) hanya disajikan dalam lingkup Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Berdasarkan buku Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1994/1995 - 1998/1999 (hal 42), tujuan pembentukan SWP adalah untuk menyetarakan pertumbuhan pembangunan antar daerah tingkat II di Jawa Timur Untuk melihat perkembangan ini terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian batasan dan definisi antara dua sensus tersebut Analisis pendahuluan ST-93 ini disajikan dalam delapan bab, dan pembahasan tiap-tiap bab dapat dijelaskan berikut ini

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang dan kondisi sektor pertanian di Propinsi Jawa Timur, tujuan pembuatan analisis, cakupan analisis, serta sumber data Konsep dan definisi yang digunakan dalam analisis juga disajikan dalam bab ini Selain itu juga disajikan babakan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam analisa

#### **BAB II. GAMBARAN RUMAHTANGGA USAHA PERTANIAN**

Bab ini membahas rumahtangga usaha pertanian secara luas yang meliputi profil rumahtangga petani pengguna lahan dan distribusinya menurut golongan luas lahan yang dikuasai Analisa banding dalam bab ini meliputi juga perbandingan peubah-peubah tersebut antara dua sensus (1993 dan 1983) Analisa yang bersifat lebih spesifik disajikan pada bab-bab selanjutnya

### **BAB III. GAMBARAN UMUM RUMAHTANGGA BUKAN USAHA PERTANIAN 1993**

Bab ini menyajikan gambaran rumahtangga bukan usaha pertanian dalam tahun sensus (1993), seperti rumahtangga kuasa usaha pertanian, rumahtangga yang berusaha di bidang pengolahan hasil pertanian, dan rumahtangga buruh tani

### **BAB IV. USAHA TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

Bab ini membahas rumahtangga tanaman pangan dan holtikultura dari ST-93 Untuk pertanian tanaman pangan khususnya padi dan palawija, disajikan pula analisa banding dari hasil ST-93 dan ST-83 Bahasan ini meliputi luas lahan sawah per rumahtangga, dan populasi pohon/rumpun/luas tanaman holtikultura menurut kabupaten di Propinsi Jawa Timur

### **BAB V. USAHA PETERNAKAN RAKYAT**

Bab ini menganalisa perkembangan rumahtangga usaha peternakan selama kurun waktu dua sensus yang meliputi rumahtangga dan populasi ternak menurut kabupaten

### **BAB VI. USAHA PERKEBUNAN RAKYAT**

Bab ini menyajikan gambaran mengenai perkembangan rumahtangga usaha perkebunan dalam kurun waktu antar dua Sensus Pertanian Pembahasannya meliputi perkembangan populasi tanaman perkebunan

### **BAB VII. USAHA PERIKANAN**

Seperti analisa yang dibahas pada bab)bab terdahulu, bab ini menyajikan analisa yang titik fokusnya adalah mengenai rumahtangga usaha budidaya ikan/biota lain, baik di kolam air tawar/sawah dan tambak air payau Rata-rata luas kolam/sawah dan tambak air payau Selain itu, titik fokus bahasan juga meliputi

perkembangan rumahtangga usaha penangkapan ikan di laut dan di perairan umum

#### **BAB VIII. RINGKASAN DAN KESIMPULAN**

Bab terakhir merupakan ringkasan dari bahasan-bahasan yang telah disajikan pada bab-bab terdahulu. Selain itu kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari analisa sederhana ini disajikan pada bab ini.

<https://jatim.bps.go.id>

## **BAB II. GAMBARAN UMUM RUMAHTANGGA USAHA PERTANIAN**

### **2.1. Profil Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan Tahun 1993**

Faktor produksi utama di dalam kegiatan sektor pertanian adalah lahan pertanian Jawa Timur adalah salah satu propinsi yang memiliki lahan pertanian yang relatif luas dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Kondisi lahan yang demikian dapat dikatakan merupakan modal dasar di dalam usaha pengembangan sektor pertanian. Dari sisi pemanfaatan lahan pertanian, data dari hasil Sensus Pertanian 1993 memberikan gambaran yang menarik. Sekitar 59 persen dari seluruh rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian dan tersebar di 29 kabupaten (tanpa kotamadya), 96 persen diantaranya merupakan rumahtangga pengguna lahan yang distribusinya menyebar secara cukup merata. Gambaran ini berarti rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian bukan pengguna lahan, seperti nelayan di perairan umum, dapat dikatakan hanya sebesar 4 persen (Tabel 2.1 dan Tabel 2.2).

#### **2.1.1. Distribusi Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kabupaten dan Jenis Usaha Pertanian Tahun 1993**

Berdasarkan hasil pendaftaran rumahtangga Sensus Pertanian 1993 tercatat bahwa jumlah rumahtangga adalah sebesar 7,11 juta, yang menyebar di 29 kabupaten. Jumlah rumahtangga terbesar terdapat di Kabupaten Jember (569 ribu) dan yang terkecil di Kabupaten Pacitan (127 ribu), atau



masing-masing sekitar 8,00 persen dan 1,79 persen dari total rumahtangga Kabupaten yang cukup besar jumlah rumahtangganya adalah Malang, 528 ribu, atau 7,43 persen, dan Banyuwangi 389 ribu (5,48 persen), sedangkan kabupaten lainnya di bawah 5 persen (Tabel 2 1 dan 2 3) Dari seluruh jumlah rumahtangga tersebut, 4,202 juta diantaranya atau sekitar 59 persen, adalah rumahtangga pertanian Tabel 2 2 menunjukkan bahwa ada 13 daerah kabupaten yang persentase rumahtangga pertaniannya di bawah 59 persen (dibawah rata-rata Jawa Timur) Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Tulungagung (56,34 persen), Kediri (47,67 persen), Malang (53,56 persen), Lumajang (56,80 persen), Jember (44,37 persen), Banyuwangi (51,71 persen), Situbondo (53,96 persen), Pasuruan (54,51 persen), Sidoarjo (20,17 persen), Mojokerto (47,27 persen), Jombang (43,60 persen), Nganjuk (56,91 persen), dan Gresik (50,08 persen) Sedangkan di 16 kabupaten lainnya persentase rumahtangga pertaniannya adalah di atas 60 persen Paling tinggi persentase jumlah rumahtangga pertaniannya adalah Kabupaten Pacitan (90,66 persen) dan Kabupaten Sampang (85,56 persen) Persentase ini di kabupaten-kabupaten lainnya bervariasi antara 60 dan 83 persen Secara absolut jumlah rumahtangga pertanian yang terbesar terdapat di Kabupaten Malang adalah 283 ribu (6,74 persen) dan yang terkecil adalah di Kabupaten Sidoarjo 57 ribu (1,36 persen)

Besarnya peranan lahan sebagai faktor produksi

pertanian di Propinsi Jawa Timur terbukti dari fakta bahwa 96 persen lebih jumlah rumahtangga pertanian merupakan rumahtangga pertanian pengguna lahan dengan jumlah sekitar 4,0 juta rumahtangga (Tabel 2.1 dan Tabel 2.2). Kecuali Kabupaten Banyuwangi, yang mana jumlah rumahtangga pertanian pengguna lahan relatif kecil (82 persen), di kabupaten lainnya angkanya di atas 90 persen. Bahkan di Kabupaten-kabupaten Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi hampir seluruh usaha pertaniannya menggunakan lahan.

Tabel 2.3 memperlihatkan kenyataan bahwa banyaknya rumahtangga pertanian pengguna lahan antar kabupaten cukup bervariasi. Kabupaten-kabupaten yang rumahtangga pertanian pengguna lahannya di atas 5 persen adalah Malang, Jember, dan Sumenep. Dalam indikator ini kabupaten-kabupaten yang mempunyai rentang antara 4 dan 5 persen ada di tiga kabupaten (Banyuwangi, Bojonegoro, dan Lamongan), antara 3 dan 4 persen ada di 12 kabupaten (Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Ngawi, Nganjuk, Tuban, dan Sampang), dan antara 2 dan 3 persen ada di 10 kabupaten (Pacitan, Trenggalek, Situbondo, Mojokerto, Jombang, Madiun, Magetan, Gresik, Bangkalan, dan Pamekasan), sedangkan yang di bawah 2 persen hanya di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2.4 dan 2.5 menunjukkan bahwa jenis usaha pertanian yang dilakukan rumahtangga pertanian pengguna lahan pada umumnya adalah usaha tanaman padi/palawija (84

persen) Rumahtangga yang berusaha dalam bidang peternakan/perunggasan sebesar 37 persen, perkebunan 24 persen, hortikultura 20 persen, dan rumahtangga yang berusaha di bidang budidaya ikan/biota lainnya hanya 2 persen (karena ada yang *overlapping*, maka hasil penjumlahan rumahtangganya lebih dari 100 persen) Dapat dipahami bahwa dalam hal distribusi rumahtangga petani pengguna lahan, rumahtangga yang mengusahakan pertanian padi/palawija, masih merupakan yang terbesar dibanding jenis usaha pertanian lainnya Salah satu alasan adalah karena komoditi ini masih merupakan komoditi utama sebagai konsumsi pokok masyarakat, selain itu harga pasarnya mempunyai tingkat kepastian yang paling tinggi (tidak fluktuatif)

Kabupaten-kabupaten yang mempunyai persentase di atas 90 persen dalam hal usaha tanaman padi/palawija terdapat di pulau Madura, di bekas Karesidenan Bojonegoro dan di sebagian bekas Karesidenan Madiun Untuk jenis usaha peternakan/perunggasan kabupaten-kabupaten yang terbesar dalam jumlah rumahtangga pertaniannya adalah Sumenep (114 ribu) atau sekitar 7,6 persen terhadap seluruh rumahtangga peternakan/perunggasan di Jawa Timur Demikian pula keterbandingan antara jenis usaha pertanian pengguna lahan, secara persentase kabupaten-kabupaten di pulau Madura merupakan wilayah utama (di atas 50 persen) Rumahtangga yang berusaha di bidang peternakan/perunggasan, kecuali Pamekasan yang hanya 29 persen, persentase di semua

kabupaten di pulau ini di atas 50 persen Sementara di luar Madura yang cukup besar adalah hanya di Situbondo dan Tuban, masing-masing 57,7 persen dan 53,7 persen Gambaran jenis rumahtangga yang berusaha di bidang hortikultura dan perkebunan relatif sudah menyebar secara merata di setiap kabupaten di Propinsi Jawa Timur, namun ada pula yang cukup tinggi persentasenya apabila dibandingkan dengan persentase di daerah lainnya, yaitu kabupaten-kabupaten Malang (9,4 persen) dan Probolinggo (5,9 persen) Sedangkan usaha perkebunan banyak terdapat di Kabupaten-kabupaten Malang, Bojonegoro, dan Sumenep, yaitu di atas 8,0 persen

Ada satu hal yang menarik pada rumahtangga usaha budidaya ikan/biota lainnya, yaitu hanya terdapat pada kabupaten-kabupaten tertentu saja, terutama Kabupaten-kabupaten Lamongan (30,4 persen), Gresik (12,31 persen), Tulungagung (10,80 persen), dan Blitar (9,6 persen) Data usaha budidaya ini merupakan gabungan dari usaha budidaya ikan/biota lainnya di air payau dan air tawar, sedangkan budidaya ikan/biota lainnya di air payau merupakan bagian yang lebih besar dari data gabungan tersebut Secara historis, di daerah-daerah tersebut memang merupakan daerah dimana secara historis banyak diusahakan ikan/biota lainnya, gambaran tersebut juga merupakan salah satu indikator bahwa usaha pertanian belum banyak didiversifikasikan

### 2.1.2. Penguasaan Lahan Pertanian

Pada Sensus Pertanian 1993 penguasaan lahan pertanian digolongkan menjadi dua bagian. pertama, rumahtangga pertanian pengguna lahan yang menguasai tanah kurang dari 0,50 ha, sering disebut sebagai petani berlahan sempit atau petani gurem, kedua, rumahtangga pertanian pengguna lahan yang menguasai tanah 0,50 ha atau lebih

Dari sekitar 4 juta rumahtangga pertanian pengguna lahan yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa rumahtangga tani yang menguasai tanah dengan luas kurang dari 0,50 hektar hampir mencapai 69 persen (Tabel 2.6) Tingginya angka ini diduga disebabkan karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk sehingga semakin banyak tanah yang dibagikan penguasaannya kepada rumahtangga pertanian yang baru, disamping semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi tempat-tempat pemukiman, industri, dan fasilitas-fasilitas lainnya Secara keseluruhan rata-rata penguasaan lahan oleh rumahtangga pertanian pengguna lahan hanya seluas 0,48 hektar

Rata-rata penguasaan lahan per rumahtangga tani antar kabupaten sangat bervariasi Kabupaten Pacitan mempunyai rata-rata penguasaan lahan paling tinggi (0,91 hektar), sejalan dengan pola penguasaan tanahnya, 62 persen rumahtangga pengguna lahan menguasai tanah setengah hektar atau lebih Kenyataan ini seiring dengan jumlah rumahtangga di Kabupaten Pacitan yang relatif rendah, sedangkan luas

wilayahnya relatif cukup besar dibanding dengan wilayah di kabupaten lain. Lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian. Urutan kedua adalah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai rata-rata luas lahan per rumahtangga tani sebesar 0,74 hektar. Faktor yang menyebabkan diantaranya bahwa rumahtangga pertanian pengguna lahan yang menguasai tanah 0,50 hektar atau lebih masih cukup tinggi (35 persen), sedangkan persentase rumahtangga pertanian pengguna lahan sangat rendah, yaitu hanya 1,36 persen (Tabel 2.3). Di Kabupaten Sidoarjo diduga ada penyewaan tanah dari petani-petani yang menguasai lahan sempit kepada petani-petani yang memang akan sepenuhnya terjun sebagai petani "profesional", dan petani gurem tersebut lebih senang memilih pekerjaan di sektor lain (sektor industri) yang memberikan upah relatif lebih baik. Dari dugaan ini, rata-rata penguasaan lahan per petani cukup luas. Hal yang mendasari dugaan ini adalah data luas lahan yang berasal dari pihak lain relatif tinggi. Urutan berikutnya adalah Kabupaten Tuban yang mempunyai rata-rata penguasaan lahan per rumahtangga tani seluas 0,69 hektar. Kenyataan ini disebabkan karena di kabupaten Tuban golongan rumahtangga tani yang menguasai tanah "0,50 hektar atau lebih" cukup tinggi (50,48 persen) dan persentase rumahtangga petani pengguna lahan (PPL) juga cukup tinggi. Kabupaten yang mempunyai rata-rata penguasaan luas lahan per rumahtangga tani yang paling rendah adalah di Kabupaten Pamekasan (0,30

hektar) Faktor yang menyebabkan adalah karena sebagian besar (83 persen) rumahtangga pertanian pengguna lahan hanya menguasai tanah kurang dari 0,50 hektar

Secara umum dapat dikatakan bahwa kabupaten-kabupaten yang rata-rata penguasaan tanahnya di atas 0,50 hektar ternyata jumlah rumahtangga petani pengguna lahannya (PPL-nya) relatif kecil, dan lebih dari 35 persen rumahtangga PPL diantaranya menguasai tanah 0,50 hektar atau lebih. Sebaliknya bagi kabupaten-kabupaten yang rata-rata penguasaan tanahnya kurang dari 0,50 hektar pada umumnya mempunyai jumlah rumahtangga PPL yang relatif tinggi, dan dari jumlah rumahtangga PPL-nya terdapat lebih dari 65 persen rumahtangga yang menguasai tanah kurang dari 0,50 hektar (Tabel 2.6)

Apabila dilihat dari status penguasaan tanahnya, sebagian besar (hampir 91 persen) lahan yang dikuasai merupakan lahan yang dimiliki sendiri oleh rumahtangga PPL. Lahan yang berasal dari pihak lain sekitar 9 persen, lebih tinggi daripada lahan yang berada di pihak lain yang hanya sekitar 7 persen. Gambaran ini menunjukkan bahwa berusaha di bidang pertanian masih dianggap menguntungkan, meskipun juga merupakan indikasi bahwa transformasi pekerja dari sektor pertanian ke sektor lain masih rendah (Tabel 2.7)

Untuk kabupaten-kabupaten yang kondisi tanahnya kurang subur, ada kecenderungan bahwa sedikit sekali terjadi perpindahan status penguasaan tanah. Bisa dilihat misalnya

di Kabupaten Pacitan, Bangkalan, dan Sampang, sedikit sekali tanah yang dikuasai rumahtangga pertanian pengguna lahan yang berasal dari pihak lain. Sedangkan bagi daerah-daerah Kabupaten yang kondisi tanahnya subur ada kecenderungan banyak terjadi penguasaan lahan yang berasal dari pihak lain, misalnya di Kabupaten Sidoarjo, Jombang, dan Nganjuk

## **2.2. Perkembangan Rumahtangga Pertanian**

Pertumbuhan penduduk Jawa Timur yang masih cukup tinggi, mengakibatkan kenaikan jumlah pencari kerja yang cukup tinggi pula. Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi *buffer* bagi pencari kerja yang tidak diterima bekerja di sektor-sektor lain, terutama sektor-sektor yang memerlukan keahlian tertentu. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tenaga kerja sektor pertanian tersebut berakibat langsung pada peningkatan rumahtangga pertanian.

Pertumbuhan rumahtangga pertanian dalam kurun waktu sepuluh tahun, 1983 sampai dengan 1993, di Jawa Timur adalah sebesar 4,44 persen di luar Kotamadya (Tabel 2.8). Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II memiliki pertumbuhan terbesar, yaitu 14,81 persen, dan diikuti SWP IX sebesar 10,34 persen. Kecuali SWP III dan SWP VII yang menunjukkan penurunan, SWP-SWP lainnya memiliki pertumbuhan yang cukup homogen, yaitu sekitar 4 sampai dengan 6 persen.

Sejumlah 96 persen rumahtangga pertanian adalah petani pengguna lahan. Besarnya persentase rumahtangga petani pengguna



lahan tersebut memberi pengaruh yang besar bagi kenaikan/penurunan jumlah rumahtangga pertanian secara keseluruhan. Kelompok di luar golongan tersebut adalah rumahtangga pertanian bukan pengguna lahan. Walaupun perannya terhadap rumahtangga pertanian seluruhnya kecil, tetapi perkembangannya menarik untuk diteliti lebih lanjut.

#### **2.2.1. Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan**

Tabel 2.9 memperlihatkan bahwa pada tahun 1993 rumahtangga pertanian pengguna lahan terbesar berada di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VII, yaitu sebesar 766 ribu, atau hampir 100 persen rumahtangga pertanian di SWP ini adalah petani pengguna lahan. Dibandingkan dengan keadaan tersebut pada tahun 1983 (783 ribu rumahtangga), terjadi penurunan sebesar 2,17 persen. Penurunan tersebut merupakan satu-satunya yang terjadi diantara SWP-SWP lainnya. Salah satu penyebabnya diduga adalah meletusnya Gunung Kelud pada tahun 1990, yang mengakibatkan lahan pertanian di sekitarnya menjadi rusak, terutama pada perbatasan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri.

Urutan kedua menurut jumlah rumahtangga pertanian pengguna lahan berada di SWP VIII, yaitu sebesar 598 ribu, diikuti SWP I sebesar 539 ribu rumahtangga. Pertumbuhan jumlah rumahtangga pertanian di dua SWP tersebut agak mirip yaitu 8,14 dan 8,67 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di SWP II sebesar 17,56 persen. Di SWP ini (Pulau Madura

kecuali Kabupaten Bangkalan), sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB, dan untuk mengejar ketinggalan dibanding petani-petani di daratan Jawa, sektor ini memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Pertumbuhan tinggi lainnya terjadi di SWP IV dan SWP VI, yaitu sebesar 17,11 dan 13,28 persen. Rumahtangga pertanian di SWP III, yang memiliki jumlah rumahtangga PPL terendah (165 ribu), tumbuh sebesar 9,21 persen.

Peningkatan jumlah rumahtangga pertanian pengguna lahan tersebut di atas tidak diimbangi dengan perluasan lahan yang dikuasai. Sebaliknya, karena berbagai kepentingan di luar usaha pertanian, lahan pertanian makin menyusut setiap tahun. Dua kondisi tersebut mengakibatkan turunnya rata-rata penguasaan lahan pertanian per rumahtangga. Tabel 2.10 memperlihatkan bahwa pada tahun 1983 rata-rata penguasaan lahan pertanian per rumahtangga di Jawa Timur sebesar 0,59 Ha, namun tahun 1993 menjadi hanya 0,48 Ha, atau turun sekitar 18,64 persen. Rata-rata penguasaan lahan terbesar di SWP IX, pada tahun 1983 sebesar 1,03 Ha turun menjadi 0,61 Ha pada tahun 1993, atau turun sekitar 40,78 persen. Dibanding SWP lain, penurunan di SWP IX tersebut merupakan yang tertinggi.

Penguasaan lahan sering digunakan sebagai indikator yang berbanding lurus dengan kemiskinan/kemakmuran rumahtangga pertanian. Makin kecil lahan yang dikuasai,

makin miskin rumahtangga tersebut, dan sebaliknya. SWP II memiliki rata-rata penguasaan lahan terkecil, yaitu 0,37 Ha pada tahun 1993, terjadi penurunan sebesar 24,49 persen apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1983 SWP IV dengan rata-rata lahan yang dikuasai sebesar 0,42 Ha, merupakan wilayah kedua terendah penguasaan lahannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dua SWP di atas merupakan daerah yang relatif lebih miskin dari segi luas lahan dibanding SWP lainnya di Propinsi Jawa Timur.

#### **2.2.2. Jenis Usaha Rumahtangga Pertanian Bukan Pengguna Lahan**

Jumlah rumahtangga pertanian yang tidak menggunakan lahan disajikan pada Tabel 2.11. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rumahtangga yang mempunyai usaha pemungutan hasil hutan dan atau penangkapan satwa liar merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh rumahtangga petani bukan pengguna lahan (293 ribu rumahtangga), diikuti oleh usaha jasa pertanian (202 ribu rumahtangga), dan usaha penangkapan ikan/biota lain di laut (sebanyak 90 ribu rumahtangga) serta usaha penangkapan ikan/biota lain di perairan umum sebesar 22 ribu rumahtangga.

Apabila angka pada Tabel 2.11 dihitung persentasenya terhadap masing-masing rumahtangga pertanian di setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang disajikan pada Tabel 2.12, akan diketahui bahwa di SWP II terdapat 7,15 persen

rumahtangga usaha penangkapan ikan/biota lain dari 477 ribu rumahtangga pertanian. Persentase ini merupakan yang terbesar dibanding di SWP yang lain, sementara yang terkecil berada di SWP VIII, yaitu sebesar 0,52 persen.

Rumahtangga pertanian yang usahanya memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar, persentase terbesar berada di SWP III (25,82 persen), angka tersebut jauh berada di atas angka dari SWP-SWP yang lain. Sedangkan untuk rumahtangga usaha jasa pertanian, persentasenya lebih homogen dibanding dua usaha pertanian yang tidak menggunakan lahan seperti yang disebut terdahulu. Secara keseluruhan dari sekitar 4,2 juta rumahtangga pertanian diketahui bahwa 2,6 persen mempunyai usaha penangkapan ikan/biota lain di laut dan usaha tersebut di perairan umum, 6,9 persen memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar, serta hampir 5 persen mempunyai usaha jasa pertanian.

Struktur persebaran tiap usaha pertanian yang tidak menggunakan lahan di masing-masing SWP terhadap total usaha di Propinsi Jawa Timur disajikan pada Tabel 2.13. Pada tabel ini ditunjukkan bahwa untuk usaha penangkapan ikan/biota lain, persentase terbesar berada di SWP II (30,4 persen), sementara untuk usaha pemungutan hasil hutan dan atau penangkapan satwa liar, serta jasa pertanian, rumahtangganya banyak berada di SWP VII dan SWP II. Sedangkan persentase terkecil untuk tiap-tiap jenis usaha tersebut masing-masing sebesar 2,81 persen, 1,97 persen, dan

6,70 persen, yang berturut-turut berada di SWP VIII, SWP II,  
dan SWP VIII

<https://jatim.bps.go.id>

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Rumahtangga, Rumahtangga Pertanian, dan**  
**Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan (PPL)**  
**Menurut Kabupaten, Tahun 1993**

Kabupaten	Jumlah Rumahtangga	Jumlah Rumahtangga Pertanian	Jumlah Rumahtangga PPL
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Pacitan	127 401	115 500	115 311
02 Ponorogo	203 770	152 624	152 556
03 Trenggalek	157 854	119 385	117 985
04 Tulungagung	218 792	123 263	121 884
05 Blitar	258 416	157 280	154 511
06 Kediri	318 305	151 728	149 958
07 Malang	528 476	283 072	277 539
08 Lumajang	237 845	135 105	128 832
09 Jember	568 705	252 325	234 144
10 Banyuwangi	389 374	201 348	165 759
11 Bondowoso	209 695	126 515	121 252
12 Situbondo	181 336	97 842	89 463
13 Probolinggo	245 992	162 330	155 007
14 Pasuruan	297 645	162 241	157 823
15 Sidoarjo	282 990	57 088	55 102
16 Mojokerto	195 055	92 204	90 245
17 Jombang	245 796	107 171	98 431
18 Nganjuk	223 780	127 356	123 278
19 Madiun	160 609	97 270	94 114
20 Magetan	149 517	98 449	98 383
21 Ngawi	204 434	139 443	138 052
22 Bojonegoro	260 501	191 345	189 249
23 Tuban	231 744	164 142	157 087
24 Lamongan	255 282	186 969	178 579
25 Gresik	198 014	99 175	94 069
26 Bangkalan	177 986	124 167	120 740
27 Sampang	156 612	133 992	131 187
28 Pamekasan	146 397	112 336	109 813
29 Sumenep	278 834	230 822	221 349
<b>Sub Jumlah</b>	<b>7 111 157</b>	<b>4 202 487</b>	<b>4 041 702</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>230 757</b>	<b>42 875</b>	<b>39 708</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>7 341 914</b>	<b>4 245 362</b>	<b>4 081 410</b>

**Tabel 2.2**  
**Persentase Rumahtangga Pertanian Terhadap Rumahtangga,**  
**Rumahtangga PPL Terhadap Rumahtangga Pertanian, Tahun 1993**

Kabupaten	Rumahtangga Pertanian	Rumahtangga PPL
(1)	(2)	(3)
01 Pacitan	90,66	99,84
02 Ponorogo	74,90	99,96
03 Trenggalek	75,63	98,83
04 Tulungagung	56,34	98,88
05 Blitar	60,86	98,24
06 Kediri	47,67	98,83
07 Malang	53,56	98,05
08 Lumajang	56,80	95,36
09 Jember	44,37	92,79
10 Banyuwangi	51,71	82,32
11 Bondowoso	60,33	95,84
12 Situbondo	53,96	91,44
13 Probolinggo	65,99	95,49
14 Pasuruan	54,51	97,28
15 Sidoarjo	20,17	96,52
16 Mojokerto	47,27	97,88
17 Jombang	43,60	91,84
18 Nganjuk	56,91	96,80
19 Madiun	60,56	96,76
20 Magetan	65,84	99,93
21 Ngawi	68,21	99,00
22 Bojonegoro	73,45	98,90
23 Tuban	70,83	95,70
24 Lamongan	73,24	95,51
25 Gresik	50,08	94,85
26 Bangkalan	69,76	97,24
27 Sampang	85,56	97,91
28 Pamekasan	76,73	97,75
29 Sumenep	82,78	95,90
<b>Sub Jumlah</b>	59,10	96,17
<b>Kotamadya</b>	18,58	92,61
<b>Jawa Timur</b>	57,82	96,14

**Tabel 2.3**  
**Persentase Rumahtangga, Rumahtangga Pertanian, dan**  
**Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan**  
**Menurut Kabupaten, Tahun 1993**

Kabupaten	Rumahtangga	Rumahtangga Pertanian	Rumahtangga PPL
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Pacitan	1,79	2,75	2,85
02 Ponorogo	2,87	3,63	3,77
03 Trenggalek	2,22	2,84	2,92
04 Tulungagung	3,08	2,93	3,02
05 Blitar	3,63	3,74	3,82
06 Kediri	4,48	3,61	3,71
07 Malang	7,43	6,74	6,87
08 Lumajang	3,34	3,21	3,19
09 Jember	8,00	6,00	5,79
10 Banyuwangi	5,48	4,79	4,10
11 Bondowoso	2,95	3,01	3,00
12 Situbondo	2,55	2,33	2,21
13 Probolinggo	3,46	3,86	3,84
14 Pasuruan	4,19	3,86	3,90
15 Sidoarjo	3,98	1,36	1,36
16 Mojokerto	2,74	2,19	2,23
17 Jombang	3,46	2,55	2,44
18 Nganjuk	3,15	3,03	3,05
19 Madiun	2,26	2,31	2,33
20 Magetan	2,10	2,34	2,43
21 Ngawi	2,87	3,32	3,42
22 Bojonegoro	3,66	4,55	4,68
23 Tuban	3,26	3,91	3,89
24 Lamongan	3,59	4,45	4,42
25 Gresik	2,78	2,36	2,33
26 Bangkalan	2,50	2,95	2,99
27 Sampang	2,20	3,19	3,25
28 Pamekasan	2,06	2,67	2,72
29 Sumenep	3,92	5,49	5,48
<b>Jawa Timur</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**Tabel 2.4**  
**Persentase Rumah tangga Pertanian Pengguna Lahan**  
**Menurut Kabupaten dan Jenis Usaha Pertanian 1993**

Kabupaten	Rumah tangga Tanaman Pangan		Perke- bunan	Peter- nakan/ Per- unggasan	Budi- daya Ikan/ biota Lainnya
	Padi dan Palawija	Horti- kultura			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Pacitan	3,30	4,30	4,61	1,94	0,53
02 Ponorogo	4,31	3,30	2,89	3,53	0,48
03 Trenggalek	3,29	1,09	4,88	1,30	2,09
04 Tulungagung	2,98	1,78	3,82	2,94	10,80
05 Blitar	3,50	4,12	3,44	3,51	9,56
06 Kediri	2,64	5,36	3,79	4,11	6,15
07 Malang	5,96	9,28	8,15	5,78	1,22
08 Lumajang	2,72	4,39	2,05	4,16	0,53
09 Jember	5,07	4,55	5,22	5,09	3,49
10 Banyuwangi	3,84	3,74	2,70	3,69	1,09
11 Bondowoso	2,78	2,41	3,10	3,68	0,81
12 Situbondo	1,71	2,13	2,08	3,40	0,29
13 Probolinggo	3,40	5,87	3,55	4,91	0,95
14 Pasuruan	3,81	4,90	2,31	4,21	1,45
15 Sidoarjo	1,28	1,03	1,86	0,59	3,64
16 Mojokerto	2,11	2,45	1,94	2,04	0,60
17 Jombang	2,31	1,51	3,39	1,95	1,27
18 Nganjuk	3,05	3,78	1,80	3,34	1,25
19 Madiun	2,39	1,67	2,10	1,52	1,25
20 Magetan	2,40	2,85	1,73	2,40	0,46
21 Ngawi	3,80	1,27	1,32	2,63	1,59
22 Bojonegoro	5,23	3,26	8,34	4,38	0,76
23 Tuban	4,18	5,60	1,21	5,57	0,56
24 Lamongan	5,05	2,49	4,48	2,94	32,42
25 Gresik	2,47	2,48	0,52	1,46	12,31
26 Bangkalan	3,29	3,94	0,31	4,68	1,03
27 Sampang	3,77	4,10	2,63	4,56	1,94
28 Pamekasan	3,13	2,35	6,82	2,10	0,07
29 Sumenep	6,23	3,99	8,96	7,58	1,39
Jawa Timur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 2.5**  
**Ratio Rumahtangga PPL Per Jenis Usaha Pertanian Terhadap**  
**Total Rumah Tangga PPL, Tahun 1993**

Kabupaten	Rumahtangga Tanaman Pangan		Perke- bunan	Peter- nakan/ Per- unggulan	Budi- daya Ikan/ biota Lainnya
	Padi dan Palawija	Horti- kultura			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Pacitan	97,76	30,40	39,08	25,49	0,29
02. Ponorogo	96,40	17,63	18,56	35,08	0,20
03 Trenggalek	95,31	7,56	40,45	16,70	1,10
04. Tulungagung	83,52	11,94	30,64	36,50	5,53
05 Blitar	77,44	21,77	21,81	34,44	3,87
06. Kediri	60,11	29,20	24,75	41,49	2,56
07. Malang	73,30	27,30	28,73	31,55	0,27
08 Lumajang	72,13	27,83	15,58	48,87	0,26
09. Jember	73,93	15,87	21,82	32,98	0,93
10. Banyuwangi	79,15	18,40	15,91	33,71	0,41
11 Bondowoso	78,24	16,22	25,03	46,03	0,42
12 Situbondo	65,40	19,41	22,71	57,66	0,20
13 Probolinggo	74,84	30,88	22,39	48,04	0,38
14 Pasuruan	82,39	25,34	14,33	40,41	0,57
15 Sidoarjo	79,33	15,33	33,11	16,20	4,13
16 Mojokerto	79,80	22,20	21,03	34,27	0,41
17 Jombang	80,02	12,49	33,74	30,09	0,81
18 Nganjuk	84,46	25,03	14,27	41,09	0,63
19 Madiun	86,72	14,51	21,81	24,48	0,83
20 Magetan	83,28	23,64	17,24	36,98	0,29
21 Ngawi	94,00	7,54	9,33	28,88	0,72
22. Bojonegoro	94,40	14,07	43,11	35,11	0,25
23 Tuban	90,86	29,12	7,54	53,73	0,22
24 Lamongan	96,63	11,36	24,52	24,96	11,34
25 Gresik	89,64	21,49	5,39	23,50	8,18
26 Bangkalan	93,12	26,62	2,55	58,68	0,54
27 Sampang	98,19	25,52	19,62	52,69	0,93
28 Pamekasan	97,26	17,48	60,75	28,98	0,04
29. Sumenep	96,12	14,70	39,58	51,90	0,39
<b>Jawa Timur</b>	<b>84,49</b>	<b>20,19</b>	<b>24,21</b>	<b>37,49</b>	<b>1,55</b>

**Tabel 2 6**  
**Persentase Rumah tangga PPL Menurut Golongan**  
**dan Rata-rata Luas Tanah yang Dikuasai, Tahun 1993**

Kabupaten	Golongan Luas Tanah yang Dikuasai		Rata-rata Luas Tanah yang Dikuasai (Ha)
	< 0,50 Ha	≥ 0,50 Ha	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Pacitan	37,63	62,37	0,91
02 Ponorogo	75,14	24,86	0,39
03 Trenggalek	74,20	25,80	0,39
04 Tulungagung	77,28	22,72	0,37
05 Blitar	65,62	34,38	0,49
06. Kediri	72,49	27,51	0,48
07 Malang	67,40	32,60	0,47
08 Lumajang	69,64	30,36	0,47
09 Jember	76,06	23,94	0,40
10 Banyuwangi	63,27	36,73	0,57
11 Bondowoso	74,08	25,92	0,41
12 Situbondo	71,65	28,35	0,48
13 Probolinggo	72,82	27,18	0,45
14 Pasuruan	70,96	29,04	0,46
15. Sidoarjo	64,77	35,23	0,74
16 Mojokerto	69,37	30,63	0,45
17 Jombang	68,29	31,71	0,53
18 Nganjuk	72,12	27,88	0,44
19 Madiun	74,81	25,19	0,41
20 Magetan	77,24	22,76	0,40
21 Ngawi	71,93	28,07	0,42
22 Bojonegoro	59,00	41,00	0,53
23 Tuban	49,52	50,48	0,69
24 Lamongan	60,42	39,58	0,55
25 Gresik	62,89	37,11	0,61
26 Bangkalan	75,18	24,82	0,37
27 Sampang	70,27	29,73	0,41
28 Pamekasan	83,04	16,96	0,30
29 Sumenep	75,36	24,64	0,37
Sub Jumlah	68,93	31,07	0,48
Kotamadya	74,49	25,51	0,51
Jawa Timur	68,98	31,02	0,48

**Tabel 2.7**  
**Persentase Luas Yang dikuasai Rumahtangga PPL**  
**Menurut Kabupaten dan Status Penguasaan Tanah, Tahun 1993**

<b>Kabupaten</b>	<b>Dimiliki (%)</b>	<b>Berasal dari Pihak Lain (%)</b>	<b>Berada di Pihak Lain (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
01 Pacitan	97,46	4,76	2,21
02. Ponorogo	90,75	19,95	10,70
03. Trenggalek	86,95	16,88	3,83
04. Tulungagung	84,42	23,66	8,08
05. Blitar	87,33	19,18	6,51
06. Kediri	83,45	25,02	8,47
07. Malang	90,22	15,95	6,17
08. Lumajang	91,45	16,86	8,30
09. Jember	91,73	16,48	8,21
10. Banyuwangi	85,56	20,83	6,39
11. Bondowoso	92,04	16,30	8,34
12. Situbondo	91,66	13,49	5,15
13. Probolinggo	91,19	15,48	6,67
14. Pasuruan	89,45	14,82	4,26
15. Sidoarjo	80,11	26,41	6,52
16. Mojokerto	86,39	24,64	11,02
17. Jombang	82,00	27,16	9,16
18. Nganjuk	80,16	27,31	7,47
19. Madiun	90,70	19,19	9,89
20. Magetan	92,67	13,93	6,60
21. Ngawi	88,03	23,99	12,01
22. Bojonegoro	84,89	23,81	8,70
23. Tuban	85,19	20,60	5,79
24. Lamongan	87,96	18,03	5,99
25. Gresik	86,93	18,70	5,62
26. Bangkalan	95,82	7,15	2,97
27. Sampang	96,98	5,84	2,82
28. Pamekasan	94,47	11,69	6,16
29. Sumenep	92,22	11,67	3,90
<b>Sub Jumlah</b>	<b>90,79</b>	<b>18,12</b>	<b>8,91</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>79,02</b>	<b>26,67</b>	<b>5,69</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>88,80</b>	<b>17,84</b>	<b>6,64</b>

**Tabel 2.8**  
**Pertumbuhan Rumahtangga Pertanian Menurut Satuan Wilayah**  
**Pembangunan**  
**(Tanpa Kotamadya), Tahun 1983 - 1993**

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Rumahtangga Pertanian 1983	Rumahtangga Pertanian 1993	Pertumbuhan 1983-1993 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	525 904	554.390	5,42
II	414 194	475.527	14,81
III	176 646	169 676	-3,95
IV	431 572	449 208	4,09
V	273 223	288.722	5,67
VI	411 035	438.160	6,60
VII	804 235	766.722	-4,66
VIII	562 213	597 728	6,32
IX	316 835	349.581	10,34
<b>Sub Jumlah</b>	3 915 857	4.089.714	4,44
<b>Kotamadya</b>	60.485	42.520	-29,70
<b>Jawa Timur</b>	3 976.342	4.132.234	3,92

**Catatan:**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan,  
Kab. Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod.  
Surabaya.
- SWP II Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep.
- SWP III Kab Banyuwangi.
- SWP IV Kab. Jember, Kab Bondowoso, Kab. Situbondo.
- SWP V Kab. Lumajang, Kab Probolinggo, Kod.  
Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab. Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod.  
Malang

- SWP VII : Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar,  
Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kod.  
Kediri,  
Kod. Blitar.
- SWP VIII : Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab.  
Magetan,  
Kab. Ngawi, Kod. Madiun.
- SWP IX : Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban.

<https://jatim.bps.go.id>

**Tabel 2.9**  
**Pertumbuhan Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan Menurut**  
**Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya) Tahun 1983 -**  
**1993**

Satuan Wilayah Pembangunan	Rumahtangga PPL 1983	Rumahtangga PPL 1993	Pertumbuhan 1983-1993 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	496.080	538.735	8,60
II	393 170	462.349	17,60
III	152 119	165.759	8,97
IV	379.639	444.859	17,18
V	245.248	283.839	15,74
VI	384.336	435.362	13,28
VII	783.032	766.047	-2,17
VIII	552.522	598.416	8,31
IX	308.924	346.336	12,11
<b>Sub Jumlah</b>	3 695 070	4.041.702	9,38
<b>Kotamadya</b>	50.022	39.708	-20,62
<b>Jawa Timur</b>	3 745 092	4.081.410	8,98

**Catatan:**

- SWP I : Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan,  
Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kod. Mojokerto, Kod.  
Surabaya.
- SWP II : Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep.
- SWP III : Kab. Banyuwangi
- SWP IV : Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo.
- SWP V : Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo, Kod.  
Probolinggo.
- SWP VI : Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kod. Pasuruan, Kod.  
Malang.
- SWP VII : Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar,  
Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kod.

Kediri,

Kod. Blitar.

- SWP VIII : Kab. Pacitan, Kab Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Magetan,

Kab. Ngawi, Kod. Madiun.

- SWP IX : Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban.

<b>Tabel 2.10</b>			
<b>Rata-Rata Luas Lahan yang dikuasai Rumahtangga Pertanian</b>			
<b>Pengguna Lahan Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa</b>			
<b>Kotamadya)</b>			
<b>Tahun 1983 - 1993</b>			
<b>Satuan Wilayah</b>	<b>1983</b>	<b>1993</b>	<b>Pertumbuhan</b>
<b>Pembangunan</b>			<b>1983 - 1993</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
I	0,61	0,52	-14,02
II	0,49	0,37	-25,47
III	0,66	0,57	-13,93
IV	0,54	0,42	-22,80
V	0,53	0,46	-13,39
VI	0,61	0,46	-24,39
VII	0,52	0,45	-13,08
VIII	0,61	0,50	-16,79
IX	1,03	0,61	-41,01
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0,59</b>	<b>0,48</b>	<b>-20,06</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>0,56</b>	<b>0,51</b>	<b>-7,55</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>0,59</b>	<b>0,48</b>	<b>-19,93</b>



**Tabel 2 11**  
**Jumlah Rumahtangga Pertanian yang Tidak Menggunakan**  
**Lahan Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya)**  
**dan Jenis Usaha Pertanian**

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Penangkapan Ikan/Biota Lain		Pemungutan Hasil Hutan dan atau Penangkapan Satwa Liar	Jasa Pertanian
	di Laut	di Perairan Umum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	17 925	9 966	19 108	13 507
II	33.393	718	5.786	38 796
III	5 934	299	51 990	13 804
IV	8 128	1 267	41 523	31 381
V	7 483	804	16 852	14 197
VI	4 675	2,692	14 562	13.678
VII	3 302	2 653	65.394	33 869
VIII	1 617	1.538	42 160	13.522
IX	4 598	2 312	35.391	28.456
Jumlah	87 055	22 249	292.766	201.210
Kotamadya	2 737	180	334	664
Jawa Timur	89 792	22 429	293 100	201 874

**Catatan**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan,  
Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod. Mojokerto, Kod Surabaya.
- SWP II . Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep.
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV . Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod. Probolinggo.
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod. Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab. Blitar,  
Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri,  
Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab. Magetan,  
Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

**Tabel 2 12**  
**Persentase Rumah tangga Pertanian yang Tidak Menggunakan Lahan Terhadap**  
**Rumah tangga Pertanian Menurut Satuan Wilayah Pembangunan**  
**(Tanpa Kotamadya) dan Jenis Usaha Pertanian Tahun 1993**

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Penangkapan Ikan/Biota Lain di	Pemungutan Hasil Hutan dan atau Penangkapan Satwa Liar	Jasa Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
I	4,98	3,41	2,41
II	7,15	1,21	8,13
III	3,10	25,82	1,93
IV	1,97	8,72	6,59
V	2,79	5,67	4,77
VI	1,65	3,27	3,07
VII	0,76	8,32	4,31
VIII	0,52	6,99	2,24
IX	1,94	9,96	8,00
<b>Jumlah</b>	2,60	6,97	4,79
<b>Kotamadya</b>	6,80	0,78	1,55
<b>Jawa Timur</b>	2,64	6,90	4,76

**Catatan.**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab. Lamongan,  
Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod. Mojokerto, Kod. Surabaya.
- SWP II Kab Sampang, Kab. Pamekasan, Kab Sumenep.
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab. Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod. Malang.
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar,  
Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod. Kediri,  
Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab. Magetan,  
Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab. Tuban

**Tabel 2.13**  
**Persentase Rumah tangga Pertanian yang Tidak Menggunakan Lahan Menurut**  
**Satuan Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya) dan**  
**Jenis Usaha Pertanian, Tahun 1993**

Satuan Wilayah Pembangunan	Penangkapan Ikan/biota Lain	Pemungutan Hasil Hutan dan atau Penangkapan Satwa Liar	Jasa Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
I	24,85	6,52	6,69
II	30,40	1,97	19,22
III	5,55	17,74	6,84
IV	8,37	14,17	15,54
V	7,38	5,75	7,03
VI	6,57	4,97	6,77 16,78
VII	5,31	22,31	6,70
VIII	2,81	14,38	14,10
IX	6,61	12,08	
<b>Jumlah</b>	97,40	99,89	99,67
<b>Kotamadya</b>	2,60	0,11	0,33
<b>Jawa Timur</b>	100,00	100,00	100,00

**Catatan**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab Lamongan,  
Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab. Situbondo.
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo.
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod. Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab Blitar,  
Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri,  
Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab. Magetan,  
Kab Ngawi, Kod Madiun.
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

### **BAB III. GAMBARAN UMUM RUMAHTANGGA BUKAN USAHA PERTANIAN 1993**

Menurut konsep Sensus Pertanian 1983, ada tiga jenis kegiatan usaha rumahtangga yang terkait langsung dengan usaha pertanian tetapi dikategorikan sebagai bukan usaha pertanian yaitu kegiatan rumahtangga kuasa usaha pertanian; rumahtangga yang berusaha dibidang pengolahan hasil pertanian, dan rumahtangga buruh pertanian. Informasi dari kegiatan-kegiatan tersebut masih merupakan gambaran dasar, dalam arti belum dapat diketahui sampai seberapa besar keterkaitannya dengan usaha pertanian. Bab ini menguraikan gambaran rumahtangga yang berusaha di bidang pengolahan hasil pertanian, dan menyajikan gambaran rumahtangga buruh pertanian.

#### **3.1. Rumahtangga Kuasa Usaha Pertanian Menurut Daerah**

Sebagaimana umumnya di beberapa tempat di Pulau Jawa, petani tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, khususnya dalam kegiatan pertanian yang diusahakan oleh rumahtangganya, tetapi juga berperan seperti seorang manajer yang melakukan fungsi-fungsi manajerial yang harus diputuskan dalam proses produksi. Misalnya keputusan tentang jenis tanaman yang harus ditanam, jenis pupuk dan pestisida yang digunakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi petani yang *mumpuni* diperlukan ketrampilan dan pengetahuan yang memadai. Dalam banyak kasus, petani sering tidak dapat melakukan semua pekerjaan dalam proses produksinya, sehingga diperlukan jasa pihak lain, namun demikian,

kuasa usaha pertanian biasanya bukan merupakan suatu kegiatan khusus yang ditangani suatu rumahtangga pertanian Usaha ini sering dikerjakan oleh rumahtangga lain di luar rumahtangga tani

Tabel 3 memperlihatkan bahwa jumlah rumahtangga kuasa usaha pertanian di Jawa Timur ada sekitar 61 ribu Jumlah terbesar berada di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VIII, yaitu lebih dari 12 ribu rumahtangga Urutan berikutnya berada di SWP VII dan SWP IV yang angkanya sekitar 8 ribu rumahtangga SWP IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban memiliki rumahtangga kuasa usaha yang paling sedikit yaitu sebesar 807 rumahtangga Informasi ini menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian besar rumahtangga pertanian di SWP IX masih mampu mengelola usaha pertaniannya sendiri dan belum menyerahkan penggarapan lahannya kepada kuasa usaha Kemungkinan lain karena rata-rata skala usaha pertanian per rumahtangga adalah kecil, sehingga kurang ekonomis apabila bagian pekerjaannya diserahkan kepada kuasa usaha

### **3.2. Rumahtangga yang Berusaha di Bidang Pengolahan Hasil Pertanian**

Kegiatan rumahtangga dalam bidang pengolahan hasil pertanian yang menggunakan bahan baku yang diproduksi dari kegiatan pertanian, biasanya dikategorikan sebagai kegiatan sektor industri pengolahan (agroindustri) Namun demikian karena kegiatan ini diasumsikan mempunyai kaitan yang erat dengan sektor pertanian dan tingkat teknologi pengolahannya juga sangat

sederhana, maka pada Sensus Pertanian 1993 kegiatan ini dicakup untuk dikumpulkan datanya

Dari hasil pendaftaran rumahtangga Sensus Pertanian 1993 tercatat sebanyak 527 ribu rumahtangga yang mempunyai kegiatan pengolahan hasil pertanian. Kalau diamati menurut SWP, akan terlihat bahwa angkanya sangat bervariasi. Jumlah terbesar berada di SWP VIII (133 ribu rumahtangga), yang disusul oleh SWP VII (101 ribu rumahtangga). Jumlah terkecil terdapat di SWP I, yang angkanya terpaut relatif besar dengan SWP VIII, yaitu sebesar 18 ribu rumahtangga. Angka ini mungkin menggambarkan bahwa di SWP I kegiatan pengolahan hasil pertanian sudah banyak yang dilakukan oleh perusahaan industri pengolahan yang tidak dicakup datanya dalam kegiatan Sensus Pertanian 1993. Sebagai catatan, bahwa dalam kegiatan ST-93, pengelompokan industri tidak mengacu kepada klasifikasi yang bersifat internasional, seperti *ISIC (International Standard Industrial Classification)*

### **3.3. Rumahtangga Buruh Tani**

Status pekerjaan sebagai buruh pertanian dapat dianggap sebagai jenis pekerjaan yang relatif mudah 'dimasuki' oleh berbagai kualifikasi tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, karena tidak diperlukan persyaratan ketrampilan dan pendidikan formal yang tinggi. Disamping itu, karena teknologi yang digunakan masih semi tradisional, sektor pertanian merupakan suatu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibanding sektor-sektor lain. Gambaran ini juga terlihat pada

Tabel 3, yang mana hampir 2,5 juta rumahtangga mempunyai kegiatan sebagai buruh pertanian. Tingginya jumlah rumahtangga buruh tani dan rendahnya rata-rata luas lahan yang dikuasai petani dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa kesejahteraan rumahtangga pertanian perlu mendapat prioritas untuk ditingkatkan. Apalagi untuk mengurangi tingkat kemiskinan, bantuan untuk rumahtangga buruh tani sangat diperlukan.

Kalau diperhatikan sebaran jumlah rumahtangga buruh pertanian menurut SWP, dapat dilihat bahwa di SWP VII terdapat 487 ribu rumahtangga. Jumlah ini sekaligus merupakan yang terbesar diantara SWP-SWP. Urutan berikutnya dengan jumlah rumahtangga buruh pertanian sebesar 357 ribu berada di SWP IV. Sedangkan SWP yang paling sedikit jumlah rumahtangga buruhnya adalah di SWP III, yaitu sebesar 173 ribu rumahtangga.

**Tabel 3**  
**Jumlah Rumahtangga yang Menjadi Kuasa Usaha,**  
**Jumlah Rumahtangga yang Menjadi Kuasa Usaha, Pengolahan**  
**Hasil Pertanian, dan Buruh Pertanian Menurut Satuan**  
**Wilayah Pembangunan (Tanpa Kotamadya) 1993**

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Rumahtangga Kuasa Usaha	Rumahtangga Pengolahan Hasil Pertanian	Rumahtangg a Buruh Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
I	6,530	18,224	273,534
II	5,266	58,139	182,742
III	6,485	15,560	173,122
IV	8,118	47,931	356,884
V	5,871	27,762	205,044
VI	6,500	37,858	301,007
VII	8,436	101,336	486,778
VIII	12,128	132,709	316,894
IX	807	87,058	182,266
<b>Jumlah</b>	<b>60,141</b>	<b>526,577</b>	<b>2,478,271</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>405</b>	<b>1,286</b>	<b>21,589</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>60,546</b>	<b>527,863</b>	<b>2,499,860</b>

**Catatan**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan,  
Kab Gresik,
- SWP II Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP III Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP IV Kab Banyuwangi
- SWP V Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP VI Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VII Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod  
Malang
- SWP VIII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar,  
Kab Kediri,  
Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod  
Blitar
- SWP IX Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab  
Magetan,  
Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP X Kab Bojonegoro, Kab Tuban



#### **BAB IV. USAHA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Tuntutan sebagai salah satu wilayah penyedia pangan nasional, membuat Jawa Timur harus bekerja keras meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian. Dengan makin bertambahnya rumahtangga pertanian pengguna lahan, sementara luas lahan makin berkurang, maka semakin dituntut adanya efisiensi penggunaan lahan dan peningkatan produktifitas. Walaupun diversifikasi jenis tanam digalakkan, komoditi pokok padi dan palawija masih tetap diutamakan. Oleh karena itu perkembangan rumahtangga usaha tanaman padi/palawija, jenis tanaman yang diusahakan dan perubahan luas lahan padi dan palawija harus dicermati. Saat ini jenis usaha pertanian ini masih bertumpu pada tanah sawah. Data mengenai rata-rata penguasaan lahan sawah per rumahtangga padi/palawija dapat dipakai sebagai alat ukur (indikator) tingkat kesejahteraan rumahtangga.

Bab ini membahas rumahtangga usaha tanaman pangan menurut daerah serta jenis tanamannya. Selain itu bab ini juga membahas banyaknya pohon/rumpun/luas tanaman hortikultura menurut daerah serta jenis tanamannya, rata-rata luas lahan sawah per rumahtangga padi/palawija menurut daerah dari hasil Sensus Pertanian 1993. Juga dilaporkan perkembangan rumahtangga usaha tanaman padi/palawija pada dua sensus pertanian terakhir, serta struktur tanaman hortikultura pada tahun 1993.

#### **4.1. Rumahtangga Usaha Tanaman Padi/palawija dan Hortikultura**

Jenis tanaman pangan yang diusahakan dan dicakup dalam listing Sensus Pertanian 1993 adalah tanaman padi/palawija, bawang merah, cabe, kacang panjang, jeruk, nenas, pisang, dan tanaman hias, serta dua jenis tanaman hortikultura yang potensial di daerahnya. Karena jenis tanaman potensi antar daerah sangat bervariasi, maka untuk jenis tanaman hortikultura ini dikelompokkan kedalam jenis tanaman pangan lainnya.

Tabel-tabel 4.1 dan 4.2 memperlihatkan bahwa di Propinsi Jawa Timur terdapat 3,4 juta rumahtangga dari 4 juta rumahtangga pertanian pengguna lahan atau sekitar 84 persen lebih, yang mengusahakan tanaman padi/palawija. Dari jumlah tersebut distribusi penyebaran ke setiap kabupaten hampir merata. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tanaman padi/palawija masih merupakan tanaman pilihan utama bagi petani di Jawa Timur, disamping mengusahakan jenis tanaman lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan tanaman padi/palawija masih merupakan komoditi andalan adalah tingkat kepastian penjualan dan tingkat harga jual produk pertanian tersebut yang tidak fluktuatif.

Disamping padi/palawija, pisang merupakan tanaman pilihan kedua yang banyak diusahakan. Sebanyak 4 persen lebih dari total rumahtangga pertanian pengguna lahan mengusahakan tanaman ini. Kabupaten-kabupaten yang cukup banyak rumahtangga usaha tanaman pisang (diatas 10 ribu) adalah Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Tingkat kemudahan dalam perawatan tanaman pisang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tanaman ini banyak

diusahakan oleh rumahtangga tani

Jenis tanaman lain yang cukup banyak diusahakan adalah tanaman cabe. Hampir 4 persen dari total rumahtangga pertanian pengguna lahan membudidayakan tanaman ini. Rumahtangga yang mengusahakan tanaman cabe terbanyak terdapat di Kabupaten Tuban, sebanyak hampir 24 ribu, kemudian terdapat Kabupaten Sampang (13 ribu lebih), dan diikuti Kabupaten Jember (11 ribu lebih). Di kabupaten-kabupaten lainnya jumlah rumahtangga yang mengusahakan tanaman cabe rata-rata di bawah 10 ribu.

Tanaman lain yang cukup menonjol diusahakan oleh rumahtangga pertanian pengguna lahan di beberapa kabupaten adalah tanaman nenas. Sebanyak 24 ribu rumahtangga usaha nenas di Jawa Timur, sekitar 96 persen lebih, berada di Kabupaten Blitar dan Kediri. Kenyataan memang menunjukkan bahwa di dua kabupaten tersebut sudah dikenal sebagai daerah produsen nenas terbesar di Jawa Timur.

Rumahtangga yang mengusahakan tanaman bawang merah sebanyak 65 persen lebih berada di Kabupaten-kabupaten Kediri, Malang, Probolinggo, dan Nganjuk. Kemudian rumahtangga usaha tanaman jeruk 66 persen berada di Kabupaten-kabupaten Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Sedangkan rumahtangga yang mengusahakan tanaman kacang panjang terbanyak terdapat di Kabupaten Bangkalan (17 persen). Untuk tanaman hias, separuh lebih dari sekitar 7 ribu rumahtangga berada di Kabupaten Malang dan Pasuruan. Hal ini disamping karena iklim di dua kabupaten tersebut memang cocok untuk tanaman hias, juga didukung oleh letak geografisnya yang

sangat dekat dengan daerah pemasaran, yaitu ke Surabaya dan ke tempat-tempat wisata yang berada di sekitar daerah tersebut

#### **4.2. Populasi dan Luas Tanaman Hortikultura**

Telah diuraikan terdahulu bahwa jenis tanaman yang cukup banyak diusahakan setelah tanaman padi/palawija adalah tanaman pisang. Sejalan dengan jumlah rumahtangga di empat kabupaten yang banyak mengusahakan tanaman pisang - yaitu Kabupaten-kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo - ternyata 25 persen lebih dari jumlah tanaman pisang di Jawa Timur diusahakan di empat kabupaten tersebut, namun apabila dilihat dari rata-rata jumlah tanaman per rumahtangga, maka yang paling banyak adalah di Kabupaten Kediri. Faktor kemudahan perawatan dan faktor historis diduga sebagai penyebab bahwa tanaman pisang banyak diusahakan di Kabupaten Kediri. Di kabupaten-kabupaten lainnya, jumlah tanaman pisang yang dibudidayakan masih di atas 500 ribu rumpun

Tabel 4 3 menunjukkan bahwa luas areal tanaman cabe di kabupaten-kabupaten di Jawa Timur mencapai lebih dari 378 juta meter persegi. Di tiga kabupaten di mana terdapat banyak rumahtangga yang mengusahakan tanaman cabe, luas arealnya mencapai hampir 30 persen dari total area di atas. Kabupaten Tuban, dengan sekitar 24 ribu rumahtangga usaha tanaman cabe, merupakan daerah yang terluas tanaman cabenya (63,5 juta meter persegi), kemudian Kabupaten Jember dan Sampang dengan jumlah luas areal sekitar 25 juta meter persegi.

Luas areal yang digunakan untuk budidaya tanaman kacang panjang sekitar 87 juta meter persegi, sedangkan tanaman untuk bawang merah seluas 83 juta meter persegi. Dari luas area yang hampir sama tersebut, jumlah rumahtangga usaha tanaman bawang merah hanya separuh dari jumlah rumahtangga usaha tanaman kacang panjang. Keadaan ini menyebabkan rata-rata luas tanaman bawang merah per rumahtangga petani pengguna lahan (PPL) lebih tinggi dibanding rata-rata luas tanaman kacang panjang per rumahtangga PPL. Salah satu penyebabnya adalah pola tanam bawang merah yang memerlukan areal khusus, berbeda dengan tanaman kacang panjang yang bisa ditanam di sela-sela atau di pinggir tanaman yang lain, bahkan juga umum ditanam di pematang sawah.

Jumlah tanaman jeruk di seluruh kabupaten-kabupaten di Jawa Timur adalah sekitar 15 juta pohon, dengan sekitar 3 juta diusahakan di Kabupaten-kabupaten Malang, Banyuwangi, Jember, dan Blitar. Menurut hasil pengamatan petani, daerah-daerah tersebut memang cocok untuk tanaman ini dilihat dilihat dari segi iklim, sehingga tanaman jeruk cukup banyak dikembangkan di Jawa Timur bagian selatan dan timur.

Luas lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman nenas di Jawa Timur mencapai lebih dari 160 juta meter persegi, dan 98 persen diantaranya adalah di Kabupaten-kabupaten Kediri, seluas 84 juta meter persegi lebih, dan di Kabupaten Blitar, seluas 74 juta meter persegi lebih.

#### 4.3. Luas Lahan Sawah per Rumahtangga Padi/Palawija

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 1993 (ST-93), dapat diketahui bahwa luas lahan sawah yang dikuasai oleh rumahtangga pertanian pengguna lahan di Jawa Timur mencapai 860 ribu hektar lebih. Apabila luas lahan tersebut dibandingkan dengan jumlah rumahtangga usaha tanaman padi/palawija sebanyak 3,4 juta rumahtangga, berarti rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai per rumahtangga hanya 0,25 hektar (Tabel 4.4). Sesuai dengan sasaran rata-rata total luas panen padi per tahun pada Pelita VI di Jawa Timur sebesar 1,6 juta hektar, lahan seluas 860 ribu hektar harus dapat ditanami padi dengan dua kali panen setahun. Kemungkinan peningkatan produksi padi dengan cara ekstensifikasi jelas sudah tertutup, sehingga jalan keluarnya hanya dengan cara intensifikasi budidaya.

Dalam kegiatan pertanian penguasaan sumber daya lahan merupakan *asset* yang amat penting untuk proses produksi. Dengan penguasaan lahan per rumahtangga yang relatif sempit, harus diimbangi dengan pemanfaatan yang optimal serta peningkatan intensitas penanaman dan kualitas tenaga kerja. Hanya dengan kombinasi faktor produksi yang demikian dapat diharapkan bahwa pendapatan yang diperoleh akan mampu mencukupi kebutuhan rumahtangga tani.

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa ada empat kabupaten dengan rata-rata luas lahan yang dikuasai rumahtangga tani di bawah 0,10 hektar, yaitu Kabupaten-kabupaten Trenggalek, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Di Kabupaten-kabupaten lainnya, di mana

rumahtangga taninya rata-rata menguasai lahan sawah di atas 0,50 hektar hanya Sidoarjo dan Jombang. Lahan sawah terluas berada di Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Jember dan Banyuwangi. Selama ini memang daerah-daerah tersebut merupakan lumbung beras

#### **4.4. Perkembangan Rumahtangga Usaha Tanaman Padi/Palawija**

Keberhasilan mewujudkan dan memantapkan swasembada pangan dalam Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I), masih bertumpu pada beras. Peningkatan produksi padi dan palawija terus diupayakan agar tidak tertinggal oleh peningkatan jumlah penduduk, dan sebagai salah satu sandaran penyerapan tenaga kerja, usaha tanaman ini harus tetap dikembangkan

Tabel 4 5 memperlihatkan bahwa jumlah rumahtangga usaha tanaman padi/palawija pada tahun 1983 adalah sebesar 3,25 juta rumahtangga, dan pada tahun 1993 meningkat menjadi 3,41 juta rumahtangga. Pertumbuhan yang terjadi dalam periode tersebut adalah 5,05 persen atau rata-rata 0,5 persen setiap tahun. Angka rata-rata pertumbuhan per tahun tersebut masih jauh lebih rendah dibanding rata-rata peningkatan produksi padi sebesar 4,67 persen per tahun. Peningkatan produksi beberapa jenis palawija, seperti jagung (11,50 per sen), kacang tanah (1,29 per sen), dan kedelai (0,85 per sen), juga lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan jumlah rumahtangga yang mengusahakannya (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam periode 10 tahun terjadi peningkatan produktifitas per rumahtangga tani.

Pertumbuhan jumlah rumahtangga usaha tanaman padi/palawija dalam periode antara dua Sensus Pertanian (1983 dan 1993) menurut kabupaten sangat bervariasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep, yaitu sebesar 19,31 persen. Dalam kelompok kabupaten-kabupaten di Pulau Madura, hanya Kabupaten Bangkalan yang memiliki pertumbuhan paling rendah. Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan memiliki pertumbuhan berturut-turut sebesar 15,24 persen dan 12,96 persen. Di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II ini peranan sektor pertanian masih sangat dominan, sehingga penambahan tenaga kerja sebagian besar tertampung di sektor ini. Kejadian serupa ditemui di Kabupaten-kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek dan Tuban. Dengan alasan yang sama, pertumbuhan di daerah tersebut cukup tinggi, yaitu berturut-turut 14,07 persen, 17,32 persen, 15,69 persen, dan 14,40 persen. Di wilayah pesisir selatan, yaitu Kabupaten-kabupaten Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Kediri, terjadi penurunan jumlah rumahtangga usaha tanaman padi dan palawija. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Kediri, yaitu sebesar 14,60 persen. Salah satu dugaan penyebab penurunan tersebut adalah adanya kebijaksanaan alih fungsi tanaman padi/palawija ke tanaman tebu (*glebakan*) yang menyita lahan cukup luas, baik di Kediri, Blitar, Malang Lumajang, maupun Jember. Penurunan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo (7,46 persen) dan Mojokerto (2,65 persen) diduga karena meningkatnya sektor industri di kawasan lingkaran Surabaya. Di wilayah ini, kemungkinan penduduk lebih tertarik bekerja di sektor industri daripada tetap berada di



sektor pertanian Bagi petani gurem, bekerja sebagai buruh memungkinkan mendapat penghasilan yang lebih tinggi dibanding sebagai petani

<https://jatim.bps.go.id>

**Tabel 4 1**  
**Jumlah Rumah tangga Pertanian Pengguna Lahan yang Mempunyai Usaha**  
**Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman, Tahun 1993**

Kabupaten	Jenis Tanaman								
	Padi Palawija	Bawang Merah	Cabe	Kacang Panjang	Jeruk	Nenas	Pisang	Tanaman Hias	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Pacitan	112 730	830	1 188	5 429	376	487	9 370	10	25 569
02 Ponorogo	147 062	278	2 862	3 042	1 352	20	4 455	56	18 627
03 Trenggalek	112 446	10	397	1 250	633	61	4 213	13	3 688
04 Tulungagung	101 803	10	895	3 500	2 738	58	5 347	102	4 025
05 Blitar	119 657	20	5 059	4 381	5 357	9 331	6 313	61	9 147
06 Kediri	90 146	4 297	8 204	1 362	176	13 723	2 591	279	20 344
07 Malang	203 432	4 843	9 669	4 349	9 601	62	21 146	2 036	41 258
08 Lumajang	92 923	12	7 560	616	7 688	12	13 742	428	11 338
09 Jember	173 108	63	11 033	3 853	12 095	61	5 758	289	10 826
10 Banyuwangi	131 204	226	4 985	1 620	9 970	61	6 372	229	12 317
11 Bondowoso	94 869	385	7 971	2 276	75	0	4 523	83	7 810
12 Situbondo	58 513	1 625	1 616	701	246	37	3 876	145	11 726
13 Probolinggo	116 008	7 458	2 648	2 024	287	0	10 502	12	32 270
14 Pasuruan	130 025	84	487	489	2 956	12	10 990	1 881	30 770
15 Sidoarjo	43 715	9	378	706	202	0	1 807	427	5 454
16 Mojokerto	72 015	198	6 827	1 101	127	0	1 842	101	11 746
17 Jombang	78 761	58	2 395	1 448	125	17	2 144	104	7 254
18 Nganjuk	104 121	7 977	7 619	1 086	366	8	3 036	66	15 392
19 Madiun	81 617	71	481	194	748	0	1 964	18	11 942
20 Magetan	81 937	2 624	956	955	1 548	10	2 473	28	19 355
21 Ngawi	129 764	31	220	434	671	6	3 539	4	6 744
22 Bojonegoro	178 650	231	6 594	2 120	147	0	4 479	230	16 486
23 Tuban	142 723	172	23 572	2 971	356	0	8 280	123	22 110
24 Lamongan	172 566	44	5 693	1 486	12	0	4 060	210	11 257
25 Gresik	84 325	149	6 436	938	67	0	3 265	159	11 760
26 Bangkalan	112 434	21	1 908	11 624	68	10	3 426	16	19 327
27 Sampang	128 811	3 827	13 037	5 906	13	7	4 395	36	12 212
28 Pamekasan	106 799	1 816	9 799	1 467	1 356	0	1 545	65	7 641
29 Sumenep	212 764	381	5 802	1 410	139	0	7 763	176	20 435
<b>Sub Jumlah</b>	<b>3 414 928</b>	<b>37 750</b>	<b>156 291</b>	<b>68 738</b>	<b>59 495</b>	<b>23 983</b>	<b>163 216</b>	<b>7 387</b>	<b>438 830</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>27 122</b>	<b>1 257</b>	<b>1 178</b>	<b>574</b>	<b>580</b>	<b>17</b>	<b>818</b>	<b>126</b>	<b>7 099</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>3 442 050</b>	<b>39 007</b>	<b>157 469</b>	<b>69 312</b>	<b>60 075</b>	<b>24 000</b>	<b>164 034</b>	<b>7 513</b>	<b>445 929</b>

**Tabel 4 2**  
**Persentase Rumah tangga Pertanian Pengguna Lahan yang Mempunyai Usaha**  
**Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman, Tahun 1993**

Kabupaten	Jenis Tanaman								
	Padi Palawija	Bawang Merah	Cabe	Kacang Panjang	Jeruk	Nenas	Pisang	Tanaman Hias	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Pacitan	97,76	0,72	1,03	4,71	0,33	0,42	8,13	0,01	22,17
02 Ponorogo	96,40	0,18	1,88	1,99	0,89	0,01	2,92	0,04	12,21
03 Trenggalek	95,31	0,01	0,34	1,06	0,54	0,05	3,57	0,01	3,13
04 Tulungagung	83,52	0,01	0,73	2,87	2,25	0,05	4,39	0,08	3,30
05 Blitar	77,44	0,01	3,27	2,84	3,47	6,04	4,09	0,04	5,92
06 Kediri	60,11	2,87	5,47	0,91	0,12	9,15	1,73	0,19	13,57
07 Malang	73,30	1,74	3,48	1,57	3,46	0,02	7,62	0,73	14,87
08 Lumajang	72,13	0,01	5,87	0,48	5,97	0,01	10,67	0,33	8,80
09 Jember	73,93	0,03	4,71	1,65	5,17	0,03	2,46	0,12	4,62
10 Banyuwangi	79,15	0,14	3,01	0,98	6,01	0,04	3,84	0,14	7,43
11 Bondowoso	78,24	0,32	6,57	1,88	0,06	0,00	3,73	0,07	6,44
12 Situbondo	65,40	1,82	1,81	0,78	0,27	0,04	4,33	0,16	13,11
13 Probolinggo	74,84	4,81	1,71	1,31	0,19	0,00	6,78	0,01	20,82
14 Pasuruan	82,39	0,05	0,31	0,31	1,87	0,01	6,96	1,19	19,50
15 Sidoarjo	79,33	0,02	0,69	1,28	0,37	0,00	3,28	0,77	9,90
16 Mojokerto	79,80	0,22	7,56	1,22	0,14	0,00	2,04	0,11	13,02
17 Jombang	80,02	0,06	2,43	1,47	0,13	0,02	2,18	0,11	7,37
18 Nganjuk	84,46	6,47	6,18	0,88	0,30	0,01	2,46	0,05	12,49
19 Madiun	86,72	0,08	0,51	0,21	0,79	0,00	2,09	0,02	12,69
20 Magetan	83,28	2,67	0,97	0,97	1,57	0,01	2,51	0,03	19,67
21 Ngawi	94,00	0,02	0,16	0,31	0,49	0,00	2,56	0,00	4,89
22 Bojonegoro	94,40	0,12	3,48	1,12	0,08	0,00	2,37	0,12	8,71
23 Tuban	90,86	0,11	15,01	1,89	0,23	0,00	5,27	0,08	14,08
24 Lamongan	96,63	0,02	3,19	0,83	0,01	0,00	2,27	0,12	6,30
25 Gresik	89,64	0,16	6,84	1,00	0,07	0,00	3,47	0,17	12,50
26 Bangkalan	93,12	0,02	1,58	9,63	0,06	0,01	2,84	0,01	16,01
27 Sampang	98,19	2,92	9,94	4,50	0,01	0,01	3,35	0,03	9,31
28 Pamekasan	97,26	1,65	8,92	1,34	1,23	0,00	1,41	0,06	6,96
29 Sumenep	96,12	0,17	2,62	0,64	0,06	0,00	3,51	0,08	9,23
<b>Rata-rata Kabupaten</b>	<b>84,49</b>	<b>0,93</b>	<b>3,87</b>	<b>1,70</b>	<b>1,47</b>	<b>0,59</b>	<b>4,04</b>	<b>0,18</b>	<b>10,86</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>68,30</b>	<b>3,17</b>	<b>2,97</b>	<b>1,45</b>	<b>1,46</b>	<b>0,04</b>	<b>2,06</b>	<b>0,32</b>	<b>17,88</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>84,33</b>	<b>0,96</b>	<b>3,86</b>	<b>1,70</b>	<b>1,47</b>	<b>0,59</b>	<b>4,02</b>	<b>0,18</b>	<b>10,93</b>

Tabel 4 3  
Jumlah Pohon/Rumpun/Luas Tanaman Hortikultura  
Menurut Jenis Tanaman, Tahun 1993

Kabupaten	Jenis Tanaman/Luas Lahan (m <sup>2</sup> )/Rumpun					
	Bawang Merah	Cabe	Kacang Panjang	Jeruk (pohon)	Nenas	Pisang (rumpun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Pacitan	1 544 947	3 628 848	4 609 259	126 059	1 025 050	1 550 114
02 Ponorogo	509 675	8 292 843	2 882 637	260 083	61 841	1 220 490
03 Trenggalek	54 377	1 156 217	1 198 098	95 139	296 503	998 076
04 Tulungagung	37 280	2 084 827	2 929 116	723 964	148 439	1 147 290
05 Blitar	97 512	9 320 057	5 657 846	2 507 918	74 110 769	1 605 777
06 Kediri	11 071 280	23 041 213	2 544 453	48 599	84 254 724	1 100 989
07 Malang	9 610 791	24 764 855	6 603 086	3 066 183	154 279	3 316 522
08 Lumajang	32 600	17 231 251	1 401 765	1 751 620	38 163	2 247 136
09 Jember	223 852	25 153 884	5 463 649	2 560 723	63 788	1 703 464
10 Banyuwangi	766 370	17 591 370	2 921 800	2 592 465	125 038	1 501 417
11 Bondowoso	1 495 084	20 393 802	4 387 831	26 149	8 322	812 648
12 Situbondo	5 728 835	5 335 659	1 367 272	25 602	39 897	557 948
13 Probolinggo	19 984 612	5 262 127	3 270 159	235 657	8 794	1 425 160
14 Pasuruan	161 441	1 386 478	911 425	532 156	30 942	1 852 727
15 Sidoarjo	102 143	674 277	722 576	26 484	1 037	565 064
16 Mojokerto	403 030	19 616 425	2 299 855	41 590	8 044	606 598
17 Jombang	136 655	6 276 372	1 664 846	29 860	31 204	797 219
18 Nganjuk	17 664 621	17 399 663	1 279 479	56 839	11 453	984 607
19 Madiun	126 571	1 145 538	242 490	135 552	28 483	785 203
20 Magetan	5 114 999	2 164 595	717 755	186 010	9 654	661 145
21 Ngawi	89 292	959 528	482 742	173 000	17 130	1 109 765
22 Bojonegoro	616 942	14 224 665	2 482 037	67 947	9 270	1 449 716
23 Tuban	313 187	63 541 250	4 403 141	92 026	11 202	1 449 826
24 Lamongan	235 585	12 543 062	1 418 532	12 800	3 042	952 210
25 Gresik	290 340	15 189 424	860 893	19 336	9 693	588 374
26 Bangkalan	102 550	4 186 355	13 696 417	34 182	42 000	860 820
27 Sampang	3 821 710	25 506 515	7 567 048	15 079	27 057	813 865
28 Pamekasan	2 343 700	18 801 389	1 416 850	142 349	2 414	574 017
29 Sumenep	794 537	11 648 985	1 599 956	32 137	1 433	1 277 251
<b>Sub Jumlah</b>	<b>83 474 518</b>	<b>378 521 474</b>	<b>87 003 013</b>	<b>15 617 508</b>	<b>160 579 665</b>	<b>34 515 438</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>3 252 559</b>	<b>2 692 857</b>	<b>822 385</b>	<b>324 583</b>	<b>250 779</b>	<b>274 079</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>86 727 077</b>	<b>381 214 331</b>	<b>87 825 398</b>	<b>15 942 091</b>	<b>160 830 444</b>	<b>34 789 517</b>

**Tabel 4.4**  
**Rata-Rata Luas Lahan Sawah per Rumahtangga Padi dan Palawija**  
**Menurut Kabupaten, Tahun 1993**

Kabupaten	Luas Lahan Sawah (Ha)	Rumahtangga Padi Palawija	Rata-Rata Luas Lahan Sawah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Pacitan	14,769,50	112,730	0,13
02 Ponorogo	25,367,61	147,062	0,17
03 Trenggalek	9,597,63	112,446	0,09
04 Tulungagung	18,110,95	101,803	0,18
05 Blitar	21,700,87	119,657	0,18
06 Kediri	33,523,23	90,146	0,37
07 Malang	31,959,41	203,432	0,16
08 Lumajang	21,189,98	92,923	0,23
09 Jember	57,524,22	173,108	0,33
10 Banyuwangi	51,364,99	131,204	0,39
11 Bondowoso	21,993,28	94,869	0,23
12 Situbondo	21,788,36	58,513	0,37
13 Probolinggo	30,337,79	116,008	0,26
14 Pasuruan	32,641,97	130,025	0,25
15 Sidoarjo	22,120,59	43,715	0,51
16 Mojokerto	27,750,62	72,015	0,39
17 Jombang	39,543,39	78,761	0,50
18 Nganjuk	36,140,62	104,121	0,35
19 Madiun	23,038,77	81,617	0,28
20 Magetan	20,242,72	81,937	0,25
21 Ngawi	33,384,50	129,764	0,26
22 Bojonegoro	65,648,79	178,650	0,37
23 Tuban	44,761,86	142,723	0,31
24 Lamongan	73,936,75	172,566	0,43
25 Gresik	28,070,79	84,325	0,33
26 Bangkalan	15,097,58	112,434	0,13
27 Sampang	11,767,46	128,811	0,09
28 Pamekasan	8,165,96	106,799	0,08
29 Sumenep	18,625,31	212,764	0,09
<b>Sub Jumlah</b>	<b>860,165,52</b>	<b>3,414,928,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>10,701,37</b>	<b>27,122,00</b>	<b>0,39</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>870,866,88</b>	<b>3,442,050,00</b>	<b>0,25</b>

**Tabel 4 5**  
**Perkembangan Rumah tangga Usaha Tanaman**  
**Tanaman Pangan Padi/Palawija,**  
**Tahun 1983 - 1993**

Kabupaten	1983	1993	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Pacitan	98 826	112 730	14,07
02 Ponorogo	125 355	147 062	17,32
03 Trenggalek	97 199	112 446	15,69
04 Tulungagung	96 799	101 803	5,17
05 Blitar	126 587	119 657	-5,47
06 Kediri	105 562	90 146	-14,60
07 Malang	209 298	203 432	-2,80
08 Lumajang	95 080	92 923	-2,27
09 Jember	173 332	173 108	-0,13
10 Banyuwangi	121 764	131 204	7,75
11 Bondowoso	90 777	94 869	4,51
12 Situbondo	64 047	58 513	-8,64
13 Probolinggo	106 875	116 008	8,55
14 Pasuruan	121 545	130 025	6,98
15 Sidoarjo	47 239	43 715	-7,46
16 Mojokerto	73 978	72 015	-2,65
17 Jombang	74 837	78 761	5,24
18 Nganjuk	101 737	104 121	2,34
19 Madiun	76 398	81 617	6,83
20 Magetan	86 703	81 937	-5,50
21 Ngawi	128 214	129 764	1,21
22 Bojonegoro	168 592	178 650	5,97
23 Tuban	124 761	142 723	14,40
24 Lamongan	159 972	172 566	7,87
25 Gresik	84 061	84 325	0,31
26 Bangkalan	106 623	112 434	5,45
27 Sampang	111 772	128 811	15,24
28 Pamekasan	94 550	106 799	12,96
29 Sumenep	178 322	212 764	19,31
<b>Sub Jumlah</b>	<b>3 250 805</b>	<b>3 414 928</b>	<b>5,05</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>37 713</b>	<b>27 122</b>	<b>-28,08</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>3 288 518</b>	<b>3 442 050</b>	<b>4,67</b>

## BAB V. USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Salah satu tujuan pembangunan di subsektor peternakan adalah meningkatkan produksi ternak dan hasil-hasilnya, dengan sasaran lanjutan adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak, melalui pendekatan skala usaha tani yang lebih ekonomis

Dibalik tujuan pembangunan subsektor peternakan tersebut, usaha peternakan rakyat pada umumnya merupakan usaha sampingan dari rumahtangga pertanian, sehingga sebagian besar pengelolaannya masih bersifat tradisional; dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan usaha utama atau sebagai sumber utama pendapatan rumahtangga. Oleh karena itu rumahtangga yang mempunyai kegiatan usaha peternakan rakyat biasanya juga mempunyai kegiatan usaha pertanian lainnya. Sejalan dengan kenaikan jumlah rumahtangga usaha pertanian, maka jumlah rumahtangga usaha peternakan secara umum juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan jumlah rumahtangga usaha peternakan ini cukup bervariasi tergantung jenis ternaknya, bahkan ada yang cenderung turun dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan manfaat ternak tersebut, disamping lingkungan yang semakin kurang mendukung. Sebagai contoh, untuk pembudidayaan ayam (petelor dan pedaging) dalam skala usaha yang cukup besar, sering masyarakat mensyaratkan adanya lokasi yang khusus karena limbahnya dianggap mencemari lingkungan.

Bab ini disajikan dalam dua subbab. Subbab 5.1 membahas

hal-hal yang meliputi perkembangan rumahtangga usaha ternak besar, perkembangan rumahtangga usaha ternak kecil, dan perkembangan rumahtangga usaha unggas Subbab 5 2 membahas tiga hal pokok populasi ternak besar, populasi ternak kecil; dan populasi unggas

### **5.1. Perkembangan Rumahtangga Usaha Peternakan Rakyat**

Jumlah rumahtangga usaha peternakan rakyat pada tahun 1983 sebesar 1 269 ribu, dan pada tahun 1993 meningkat menjadi 1 515 ribu rumahtangga (Tabel 5 1). Dalam periode 10 tahun tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 19,40 persen, atau rata-rata 1,94 persen setahun Antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) angka pertumbuhannya sangat bervariasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di SWP IX sebesar 33,56 persen, diikuti SWP VII sebesar 27,35 persen, dan SWP IV sebesar 22,05 persen. Pertumbuhan terendah terjadi di SWP III sebesar 2,59 persen. Secara absolut jumlah rumahtangga usaha peternakan rakyat terbesar pada tahun 1993 adalah SWP VII yaitu sebesar 260 ribu, dan SWP II sebesar 216 ribu rumahtangga. Jumlah rumahtangga usaha peternakan rakyat di dua SWP tersebut sebagai dua terbesar sejak tahun 1983.

Pada kelompok rumahtangga usaha ternak besar (Tabel 5.2), usaha sapi perah memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 56,61 persen. Secara absolut jumlahnya tidak terlalu besar, yaitu hanya 25 ribu rumahtangga pada tahun 1983 dan meningkat menjadi 39 ribu rumahtangga pada tahun 1993. Konsentrasi usaha sapi perah berada pada SWP VI, yang pada tahun 1983 sebesar 19



ribu (76 persen dari total populasi), dan pada tahun 1993 meningkat menjadi 34 ribu rumahtangga (87 persen dari total populasi) Pertumbuhan yang terjadi pada SWP ini adalah sebesar 81,74 persen selama sepuluh tahun, yang dicatat oleh dua sensus pertanian SWP VI yang terdiri dari Kabupaten-kabupaten Malang dan Pasuruan menjadi sentra usaha sapi perah Kenyataan ini barangkali karena didukung oleh iklim yang sesuai dan kemudahan pakan yang cukup.

Pengembangan rumahtangga usaha sapi perah yang dilakukan di SWP VII, walaupun memperlihatkan pertumbuhan 100 persen, baru melibatkan 2 ribu rumahtangga pada tahun 1983, yang meningkat menjadi 4 ribu rumahtangga pada tahun 1993 Pada SWP lain, usaha sapi perah nampak kurang berhasil Penurunan terjadi pada SWP I sampai dengan SWP V, sedangkan pada SWP VIII dan IX walaupun terjadi peningkatan tetapi hanya melibatkan beberapa rumahtangga

Rumahtangga usaha ternak sapi merupakan bagian yang lebih besar dibanding usaha ternak besar lainnya 93 persen usaha ternak besar adalah rumahtangga usaha ternak sapi walaupun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, yaitu hanya 12,06 persen dalam kurun waktu 10 tahun, tetapi secara absolut meningkat 126 ribu rumahtangga, itu berarti naik lebih dari 12 ribu rumahtangga setiap tahun Dibanding usaha ternak besar lainnya, rumahtangga usaha ternak sapi memiliki pertumbuhan positif di seluruh SWP Selama dua sensus pertanian, pertumbuhan tertinggi terjadi di SWP IX, yaitu 28,22 persen, diikuti oleh SWP VII sebesar 20,60 persen Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di SWP VI yaitu

sebesar 0,90 persen, dan SWP I sebesar 3,03 persen. Sebaran rumahtangga usaha ternak sapi ini cukup merata. Jumlah terbesar berada di SWP II yaitu sebesar 192 ribu rumahtangga, dan SWP VII sebesar 183 ribu rumahtangga. Jumlah terkecil berada di SWP III, yaitu sejumlah 37 ribu rumahtangga. Kemudahan pemeliharaan dan pemasaran - karena kebutuhan dagingnya, dan karena dapat difungsikannya untuk berbagai kegiatan - merupakan alasan meratanya usaha ternak sapi ini.

Dibanding rumahtangga usaha ternak sapi dan sapi perah, usaha rumahtangga ternak kerbau dan kuda mengalami penurunan dalam periode yang sama, masing-masing sebesar 27,17 persen dan 51,61 persen. Untuk ternak kerbau, pertumbuhan positif hanya terjadi di SWP II dan SWP V, sedangkan di SWP lainnya terjadi penurunan yang cukup merata yaitu antara 17,81 persen sampai dengan 38,86 persen. Sebaran rumahtangga usaha ternak kerbau ini cukup bervariasi. Terbesar di SWP VIII sebesar 9 ribu rumahtangga, diikuti SWP III sebesar 8 ribu rumahtangga, dan SWP VII sebesar 6 ribu rumahtangga. Penurunan usaha rumahtangga ternak kuda terjadi di seluruh SWP, terendah di SWP VI sebesar 28,78 persen, dan tertinggi di SWP VIII sebesar 87,41 persen. Pada ternak kerbau penurunan usaha diduga karena usaha tersebut makin tidak menguntungkan, dagingnya kurang disukai dibanding daging sapi, dan sebagai tenaga bantu di sektor pertanian sudah terdesak oleh sapi dan traktor. Sementara usaha ternak kuda yang selama ini lebih berperan sebagai alat bantu transportasi, semakin terdesak oleh kendaraan bermotor yang lebih cepat, lebih

murah dan mempunyai tingkat mobilitas yang lebih tinggi

Usaha rumahtangga ternak kecil tidak menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibanding ternak besar (Tabel 5.3). Di Jawa Timur hanya rumahtangga usaha ternak domba yang memperlihatkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 22,83 persen. Rumahtangga ternak kambing turun sebesar 5,99 persen, dan jumlah rumahtangga usaha ternak babi turun sebesar 28,40 persen. Pada usaha ternak domba, pertumbuhan tertinggi terjadi di SWP II, yaitu sebesar 96,07 persen, diikuti SWP IX sebesar 91,85 persen. Sedangkan penurunan usaha terjadi di SWP V sebesar 7,11 persen, dan SWP VIII sebesar 23,78 persen. Pada ternak kambing, walaupun dalam skala Propinsi Jawa Timur terjadi penurunan, tiga dari sembilan SWP memperlihatkan peningkatan. Tiga SWP tersebut adalah SWP II (tumbuh 68,79 persen), SWP IX (tumbuh 25,04 persen), dan SWP III (tumbuh 20,97 persen). Sulit menjelaskan sebab-sebab penurunan usaha ternak kambing dan domba ini, mengingat kemampuan adaptasi ternak ini cukup tinggi, tidak terlalu sulit pemeliharaannya, dan pemasarannya juga mudah. Hal ini berbeda dengan usaha ternak babi, walaupun ada dua SWP yang menunjukkan peningkatan, namun secara absolut terlalu kecil jumlahnya. Jawa Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan sulit mengembangkan usaha ternak babi ini.

Pada rumahtangga usaha unggas, secara absolut jumlah rumahtangga usaha yang terbesar pada tahun 1993 adalah usaha ayam buras, yaitu sebesar 46 ribu rumahtangga, diikuti usaha itik/itik manila sebesar 43 ribu rumahtangga (lihat Tabel 5.4). Pada tahun

yang sama, jumlah rumahtangga usaha ayam ras petelor sebesar 12 ribu rumahtangga, dan ayam ras pedaging 7 ribu rumahtangga. Walaupun ayam ras pedaging memiliki jumlah yang relatif kecil dibanding unggas lainnya, tetapi pertumbuhan usaha dari tahun 1983 ke tahun 1993 paling tinggi, yaitu 113,14 persen. Pertumbuhan usaha ayam buras hanya 5,19 persen, itik/itik manila sebesar 17,80 persen, sedangkan usaha ayam ras petelor justru turun 24,91 persen. Hal yang menarik adalah rumahtangga usaha ayam ras pedaging yang meningkat di seluruh SWP. Secara persentase pertumbuhannya nampak sangat tinggi di beberapa SWP, hal itu terjadi karena kecilnya jumlah rumahtangga usaha unggas tersebut pada tahun 1983. Ayam buras yang pemeliharaannya relatif lebih mudah dibanding ayam ras, jumlah rumahtangga usahanya turun di enam SWP. Pertumbuhan positif terjadi di SWP II, SWP IV dan SWP V. Konsentrasi rumahtangga peternak ayam buras berada di SWP VII, yang justru menunjukkan penurunan 8,22 persen. SWP VII juga merupakan konsentrasi peternak itik/itik manila. Di SWP ini pertumbuhan rumahtangga usaha itik/itik manila adalah sebesar 31,59 persen, sementara pertumbuhan terbesar terjadi di SWP II, yaitu sebesar 84,52 persen, diikuti SWP IX sebesar 68,41 persen.

## **5.2. Perkembangan Populasi Ternak/Unggas**

Penyebaran populasi ternak diantaranya bergantung pada daya adaptasi terhadap iklim dan kondisi lingkungan tempat ternak tersebut dipelihara. Jenis ternak yang mampu beradaptasi pada

hampir semua iklim dan tempat, penyebarannya akan lebih luas dan merata. Sebaliknya jenis ternak yang hanya bisa berkembang biak secara baik pada iklim tertentu, hanya bisa dijumpai pada tempat tertentu pula.

Sapi perah merupakan ternak besar yang membutuhkan iklim tertentu untuk pengembangannya. Ternak ini bisa saja dipelihara di semua tempat dan iklim, tetapi hasil produksinya tidak sebaik apabila dipelihara di daerah sejuk dengan pakan segar yang mudah diperoleh di daerah tersebut. Seperti halnya dengan rumahtangga usaha ternak, populasi sapi perah menunjukkan pertumbuhan tertinggi dibanding populasi ternak besar lainnya. Pada Tabel 5.5 terlihat bahwa pertumbuhan selama periode tahun 1983 sampai dengan tahun 1993 adalah sebesar 41,87 persen. Pertumbuhan positif hanya terjadi di tiga SWP, yaitu SWP VI, SWP VII, dan SWP VIII. Besarnya angka pertumbuhan tersebut berturut-turut adalah 70,55 persen, 75,83 persen, dan 74,12 persen. Konsentrasi populasi berada di SWP VI. Sebanyak 84,45 persen sapi perah berada di sini, sedangkan 11,27 persen berada di SWP VII. Penurunan populasi terjadi di enam SWP, namun karena nilai absolutnya kecil sehingga penurunan tersebut kurang berarti.

Populasi ternak sapi tumbuh sebesar 9,92 persen, yaitu dari 3.397 ribu pada tahun 1983 menjadi 3.734 ribu pada tahun 1993. Pertumbuhan tertinggi terjadi di SWP IX yaitu sebesar 25,77 persen, diikuti SWP VIII sebesar 17,76 persen, dan SWP VII sebesar 17,46 persen. Pada SWP II terjadi penurunan populasi sebesar 3,08 persen. Dalam hal jumlah absolut, populasi sapi di

SWP II menduduki urutan ke dua pada tahun 1993, yaitu sebesar 557 ribu ekor, sementara urutan pertama berada di SWP VII sebesar 599 ribu ekor. Kondisi ini merupakan kebalikan dari tahun 1983, yaitu SWP II berada pada urutan I sebesar 574 ribu ekor sedang SWP VII urutan II sebesar 510 ribu ekor.

Berbeda dengan ternak sapi, populasi ternak kerbau di SWP II justru meningkat, yaitu dari 6 ribu di tahun 1983 menjadi 10 ribu di tahun 1993, atau tumbuh sekitar 62 persen dalam periode 10 tahun. Satu-satunya SWP yang meningkat populasinya adalah SWP II, yaitu sebesar 62,31 persen. Di SWP lainnya terjadi penurunan antara 19 sampai dengan 57 persen. Populasi ternak kerbau terbesar berada di SWP IX, yang pada tahun 1993 berjumlah 29 ribu, turun sekitar 47 persen dibanding tahun 1983 yaitu sebesar 55 ribu ekor. Jumlah ternak kerbau terbesar kedua adalah pada SWP III yaitu sebesar 22 ribu ekor pada tahun 1993, padahal urutan kedua terbesar tahun 1983 adalah pada SWP VII yaitu sebesar 37 ribu ekor.

Populasi ternak kuda turun sebesar 38,49 persen, yaitu dari 35 ribu ekor pada tahun 1983, menjadi 21 ribu ekor pada tahun 1993. Urutan populasinya pada tahun 1993 pada setiap SWP adalah, SWP IV sebesar 6 ribu ekor, diikuti SWP VI sebesar 3,5 ribu ekor, dan SWP II sebesar 3 ribu ekor. Populasi ternak kuda terkecil berada di SWP VII yaitu sedikit kurang dari seribu ekor.

#### **Populasi Ternak Kecil**

Populasi kambing/domba sebesar 3 377 ribu ekor pada tahun 1993, dibanding tahun 1983 sebesar 3 127 ribu ekor,

terjadi pertumbuhan sebesar 7,29 persen (Tabel 5 6) Sentra ternak kambing/domba berada di SWP VII, VIII, dan IX Dari tiga wilayah tersebut terdapat 56,21 persen dari seluruh total populasi Kabupaten di Jawa Timur Pertumbuhan ternak ini sangat bervariasi Penurunan terjadi di SWP V dan SWP VI, masing-masing sebesar 17,54 persen dan 9,18 persen Sedang pertumbuhan terbesar terjadi di SWP IX yaitu sebesar 52,68 persen Pemeliharaan yang relatif mudah, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi membuat ternak ini dapat dipelihara di banyak tempat Oleh karena itu peningkatan populasi masih dapat dilakukan di seluruh SWP.

Populasi ternak babi hanya sekitar 1 persen dari seluruh ternak kecil Tahun 1983 populasi babi sebesar 42 ribu ekor, turun menjadi 24 ribu ekor pada tahun 1993, atau turun sebesar 43,34 persen Penurunan populasi babi terjadi di 7 SWP, sedangkan di 2 SWP yang menunjukkan peningkatan adalah SWP V dan SWP VI Jumlah babi di dua SWP tersebut adalah sekitar 8 ribu ekor, sementara populasi terbesar berada di SWP VII yaitu sebesar 11 ribu ekor

#### **Populasi Unggas**

Populasi unggas terbesar adalah ayam buras. Dari Tabel 5 7 ditunjukkan bahwa pada tahun 1993 populasi ayam buras sebanyak 21 541 ribu ekor, atau 53,46 persen dari seluruh populasi unggas Dibanding populasi tahun 1983 sebesar 19 458 ribu ekor, terjadi pertumbuhan sebesar 10,71 persen dalam kurun waktu 10 tahun tersebut (dua sensus pertanian)

Sesuai dengan konsentrasi rumahtangga usahanya, populasi terbesar berada di SWP VII, sebesar 4 837 ribu ekor pada tahun 1993, dan populasi terkecil berada di SWP III, sebesar 936 ribu ekor. Perkembangan populasi ayam buras berbeda dengan perkembangan rumahtangga usahanya. Tujuh SWP menunjukkan peningkatan, dan hanya dua SWP yang menunjukkan penurunan. Dua SWP tersebut adalah SWP III, turun sebesar 5,77 persen dan SWP VII turun sebesar 0,76 persen.

Ayam ras (petelur dan pedaging) menempati urutan kedua, sebesar 14,4 juta ekor pada tahun 1993. Perkembangan dari tahun 1983 lebih dari tiga kali (5 juta ekor). Beberapa SWP memiliki populasi diatas 1 juta ekor, yaitu SWP VII (5,7 juta ekor), SWP I (2,7 juta ekor), SWP VI (2,5 juta ekor), dan SWP VIII (1,7 juta ekor). Populasi terendah berada di SWP IX sebesar 203 ribu ekor. Peningkatan populasi terjadi di seluruh SWP, dengan angka pertumbuhan yang sangat bervariasi. Pertumbuhan terendah di SWP V (23,36 persen), dan tertinggi di SWP II (507,41 persen). Peningkatan teknologi pemeliharaan dan kemudahan pemasaran, merupakan alasan dari perkembangan populasi unggas ini.

Populasi unggas terkecil adalah itik/itik manila. Tahun 1983 populasi itik/itik manila adalah 2.716 ribu ekor, tahun 1993 meningkat menjadi 4 364 ribu ekor. Pertumbuhan yang terjadi dalam periode tersebut adalah sebesar 60,72 persen. Mayoritas populasi itik/itik manila berada di SWP VII, sebesar 1 543 ribu ekor (tahun 1993), dan SWP I sebesar



1 046 ribu ekor Peningkatan populasi terjadi hampir di seluruh SWP, kecuali SWP III yang turun 16,73 persen Pertumbuhan terbesar berada di SWP VII, yaitu sebesar 112,05 persen, SWP I sebesar 93,76 persen Daging itik/itik manila mulai disukai dan mendesak produksi daging ayam buras Walaupun pemeliharaannya memerlukan habitat tertentu, namun relatif lebih mudah dibanding ayam ras

<https://jatim.bps.go.id>

**Tabel 5.1**  
**Perkembangan Rumahtangga Usaha Peternakan Rakyat**  
**Menurut SWP (Tanpa Kotamadya)**  
**Tahun 1983 - 1993**

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Rumahtangga Usaha Peternakan Rakyat		Pertumbuhan 1983 - 1993 (%)
	1983	1993	
(1)	(2)	(3)	(4)
I	155 196	177 388	14,30
II	183 914	215 831	17,35
III	54 464	55 877	2,59
IV	151 255	184 604	22,05
V	125 632	137 430	9,39
VI	127 636	151 343	18,57
VII	204 090	259 901	27,35
VIII	154 071	182 197	18,26
IX	112 943	150 850	33,56
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1 269 201</b>	<b>1 515 421</b>	<b>19,40</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>13 233</b>	<b>10 651</b>	<b>-19,51</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>1 282 434</b>	<b>1 526 072</b>	<b>19,00</b>

**Catatan:**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan,  
Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto,  
Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar,  
Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri,  
Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan,  
Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

**Tabel 5 2**  
**Perkembangan Rumahtangga Usaha Ternak Besar**  
**Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Ternak,**  
**Tahun 1983 - 1993**

SWP	Sapi Perah			Sapi			Kerbau			Kuda		
	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	1 474	568	-61,47	129 661	133 584	3,03	7 009	4 544	-35,17	141	50	-64,54
II	25	0	-100,00	177 400	191 985	8,22	2 450	3 401	38,82	428	282	-34,11
III	50	25	-50,00	35 618	37 355	4,88	9 703	7 975	-17,81	293	97	-66,89
IV	753	102	-86,45	137 115	155 149	13,15	1 060	757	-28,58	447	312	-30,20
V	1 938	440	-77,30	109 829	122 807	11,82	645	1 719	166,51	248	72	-70,97
VI	18 637	33 871	81,74	92 402	93 236	0,90	1 212	996	-17,82	205	146	-28,78
VII		3 799	99,11	151 949	183 243	20,60	10 303	6 486	-37,05	169	26	-84,62
VIII	1 908	56	180,00	112 863	127 615	13,07	15 529	9 494	-38,86	135	17	-87,41
IX	20	39	18,18	99 155	127 133	28,22	4 264	2 625	-38,44	40	17	-57,50
	33											
<b>Sub Jumlah</b>	<b>24 838</b>	<b>38 900</b>	<b>56,61</b>	<b>1 045 992</b>	<b>1 172 107</b>	<b>12,06</b>	<b>52 175</b>	<b>37 997</b>	<b>-27,17</b>	<b>2 106</b>	<b>1 019</b>	<b>-51,61</b>
<b>Kota-madya</b>	<b>364</b>	<b>205</b>	<b>-43,68</b>	<b>7 379</b>	<b>7 374</b>	<b>-0,07</b>	<b>663</b>	<b>276</b>	<b>-58,37</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>-45,45</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>25 202</b>	<b>39 105</b>	<b>55,17</b>	<b>1 053 371</b>	<b>1 179 481</b>	<b>11,97</b>	<b>52 838</b>	<b>38 273</b>	<b>-27,57</b>	<b>2 128</b>	<b>1 031</b>	<b>-51,55</b>

**Catatan**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

Tabel 5 3 Perkembangan Rumahtangga Usaha Ternak Kecil Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Ternak, Tahun 1983 - 1993									
SWP	Babi			Kambing			Domba		
	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	18	0	-100,00	9 193	8 929	-2,87	1 487	2 472	66,24
II	0	0	0	2 579	4 353	68,79	560	1 098	96,07
III	55	19	-65,45	2 818	3 409	20,97	1 168	1 398	19,69
IV	95	121	27,37	5 751	5 408	-5,96	1 230	2 149	74,72
V	146	156	6,85	4 530	2 983	-34,15	2 616	2 430	-7,11
VI	218	67	-23,39	10 914	8 445	-22,62	2 111	2 294	8,67
VII	635	457	-28,03	19 737	19 672	-0,33	2 344	3 145	34,17
VIII	228	86	-62,28	16 865	11 875	-29,59	4 365	3 327	-23,78
IX	10	0	-100,00	9 605	12 010	25,04	1 730	3 319	91,85
<b>Sub- jumlah</b>	1 405	1 006	-28,40	81 992	77 084	-5,99	17 611	21 632	22,83
<b>Kota- madya</b>	78	6	-92,31	1 764	716	-59,41	357	207	-42,02
<b>Jawa Timur</b>	1 483	1 012	-31,76	83 756	77 800	-7,11	17 968	21 839	21,54

**Catatan.**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

**Tabel 5 4**  
**Perkembangan Rumah tangga Usaha Unggas Menurut SWP (Tanpa Kotamadya)**  
**dan Jenis Unggas Tahun 1983 - 1993**

S W P	Ayam Buras			Ayam Ras Petelur			Ayam Ras Pedaging			Itik/Itik Manila		
	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	5 567	5 301	-4,78	1 761	859	-51,22	1 222	1 303	6,63	6 427	8 706	35,46
II	1 542	4 158	169,65	445	1 187	166,74	14	194	1 285,71	1 460	2 694	84,52
III	2 157	1 620	-24,90	612	335	-45,26	40	152	280,00	3 801	2 289	-39,78
IV	2 408	3 550	47,43	1 436	886	-38,30	65	627	864,62	4 449	4 845	8,90
V	1 668	4 384	162,83	720	207	-71,25	94	410	336,17	3 273	2 979	-8,98
VI	5 075	4 995	-1,58	1 632	947	-41,97	692	1 041	50,43	3 173	2 792	-12,01
VII	12 022	11 034	-8,22	6 886	5 163	-25,02	603	1 973	227,20	9 728	12 801	31,59
VIII	8 019	7 056	-12,01	1 648	1 973	19,72	377	728	93,10	2 078	2 339	12,56
IX	4 970	3 583	-27,91	394	107	-72,84	36	271	652,78	2 102	3 540	68,41
<b>Sub Jumlah</b>	<b>43 428</b>	<b>45 681</b>	<b>5,19</b>	<b>15 534</b>	<b>11 664</b>	<b>-24,91</b>	<b>3 143</b>	<b>6 699</b>	<b>113,14</b>	<b>36 491</b>	<b>42 985</b>	<b>17,80</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>1 268</b>	<b>390</b>	<b>-69,24</b>	<b>1 006</b>	<b>93</b>	<b>-90,76</b>	<b>522</b>	<b>90</b>	<b>-82,76</b>	<b>518</b>	<b>439</b>	<b>-15,25</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>44 696</b>	<b>46 071</b>	<b>3,08</b>	<b>16 540</b>	<b>11 757</b>	<b>-28,92</b>	<b>3 665</b>	<b>6 789</b>	<b>85,24</b>	<b>37 009</b>	<b>43 424</b>	<b>17,33</b>

**Catatan**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan,  
Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar,  
Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

**Tabel 5 5**  
**Perkembangan Populasi Ternak Besar Menurut Satuan Wilayah Pembangunan**  
**dan Jenis Ternak 1983 - 1993**

S W P	Sapi Perah			Sapi			Kerbau			Kuda		
	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	5 493	1 994	-63,70	407 669	420 629	3,18	23 976	13 330	-44,40	2 119	1 457	-31,24
II	30	0	-100,00	574 372	556 679	-3,08	6 137	9 961	62,31	4 555	2 991	-34,34
III	141	76	-46,10	103 839	110 148	6,08	29 521	22 219	-24,73	2 574	1 790	-30,46
IV	1 615	408	-74,74	444 490	509 552	14,64	5 553	2 359	-57,52	9 034	6 426	-28,87
V	5 166	912	-82,35	341 214	359 808	5,45	5 390	4 364	-19,04	4 740	1 870	-60,55
VI	43 782	74 669	70,55	304 917	314 045	2,99	3 934	3 137	-20,26	5 537	3 486	-37,04
VII	5 669	9 968	75,83	509 943	598 969	17,46	36 862	20 960	-43,14	2 415	850	-64,80
VIII	170	296	74,12	371 661	437 650	17,76	54 852	29 261	-46,65	2 402	1 460	-39,22
IX	256	91	-64,45	339 526	427 030	25,77	17 762	10 629	-40,16	1 435	1 081	-24,67
<b>Sub Jumlah</b>	62 322	88 414	41,87	3 397 631	3 734 510	9,92	183 987	116 220	-36,83	34 811	21 411	-38,49
<b>Kota-madya</b>	3 816	636	-83,33	25 082	23 713	-5,46	2 677	953	-64,40	729	323	-55,69
<b>Jawa Timur</b>	66 138	89 050	34,64	3 422 713	3 758 223	9,80	186 664	117 173	-37,23	35 540	21 734	-38,85

**Catatan**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun

**Tabel 5 6**  
**Perkembangan Populasi Ternak Kecil Menurut SWP (tanpa Kotamadya)**  
**dan Jenis Ternak, Tahun 1983 - 1993**

S W P	Babi			Kambing/Domba		
	1983	1993	%	1983	1993	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	112	0	-100,00	357 841	374 214	4,58
II	26	0	-100,00	186 407	206 505	10,78
III	7 021	412	-94,13	102 965	127 226	23,56
IV	6 209	1 046	-83,15	230 579	238 831	3,58
V	1 721	3 889	125,97	251 574	207 444	-17,54
VI	3 418	4 169	21,97	357 400	324 589	-9,18
VII	17 246	11 215	-34,97	682 714	777 699	13,91
VIII	6 038	3 211	-46,82	679 536	695 798	2,39
IX	509	25	-95,09	278 287	424 884	52,68
Sub Jumlah	42 300	23 967	-43,34	3 127 303	3 377 190	7,99
Kotamadya	4 818	199	-95,87	57 967	31 247	-46,10
Jawa Timur	47 118	24 166	-48,71	3 185 270	3 408 437	7,01

**Catatan:**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

**Tabel 5 7**  
**Perkembangan Populasi Unggas Menurut SWP (Tanpa Kotamadya)**  
**dan Jenis Ternak, Tahun 1983 - 1993**

S W P	Ayam Buras			Ayam Ras Petelur/Pedaging			Itik/itik Manila		
	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	2 592 953	2 798 131	7,91	772 277	2 666 436	245,27	539 968	1 046 265	93,76
II	1 076 414	1 808 565	68,02	70 275	426 856	507,41	121 445	180 701	48,79
III	993 715	936 369	-5,77	183 400	265 589	44,81	202 483	168 613	-16,73
IV	1 589 541	1 969 822	23,92	315 870	649 114	105,50	280 176	342 293	22,17
V	1 165 060	1 357 908	16,55	185 278	228 550	23,36	217 298	243 348	11,99
VI	2 269 399	2 402 365	5,86	679 902	2 478 408	264,52	299 185	323 283	8,05
VII	4 873 813	4 836 933	-0,76	2 141 590	5 722 257	167,20	727 553	1 542 776	112,05
VIII	3 210 080	3 730 027	16,20	521 522	1 749 107	235,39	148 248	239 416	61,50
IX	1 686 557	1 700 556	0,83	139 665	202 946	45,31	179 164	277 582	54,93
<b>Sub Jumlah</b>	19 457 532	21 540 676	10,71	5 009 779	14 389 263	187,22	2 715 520	4 364 277	60,72
<b>Kotamadya</b>	608 224	267 878	-55,96	444 783	161 219	-63,75	48 393	55 884	15,47
<b>Jawa Timur</b>	20 065 756	21 808 554	8,69	5 454 562	14 550 482	166,76	2 763 913	4 420 158	59,92

**Catatan**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban



## BAB VI. USAHA PERKEBUNAN RAKYAT

Usaha perkebunan rakyat merupakan kegiatan yang cukup menarik untuk diamati, karena disamping sebagai salah satu subsektor penghasil devisa negara selain minyak dan gas bumi, juga merupakan subsektor yang memberikan kontribusi lebih besar dibanding yang diberikan perkebunan besar negara (PTP/PNP) dan bisnis perkebunan yang diusahakan oleh swasta. Meskipun selama Pelita V (tahun 1989/90 - 1992/93) menunjukkan grafik yang menaik - baik dalam hal luas areal, produktifitas, maupun nilai eksportnya (buku Repelita VI Jawa Timur) - namun khususnya perkebunan rakyat, masih diperlukan adanya peningkatan mutu sumber daya manusianya (SDM-nya). Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa dari indikator jumlah rumahtangga dan populasi pohon yang ditunjukkan oleh hasil Sensus Pertanian 1983 dan 1993, pada umumnya menunjukkan penurunan. Perubahan tataaniaga yang tidak efisien mengakibatkan tingkat harga menjadi rendah serta produksi yang belum berorientasi kepada pasar belum melahirkan daya saing yang kompetitif, baik di dalam maupun di luar negeri.

Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu usaha perkebunan rakyat telah ditempuh oleh pemerintah, yaitu dengan menerapkan teknologi tepat guna, memanfaatkan sumber-sumber daya, diversifikasi tanaman,, ekstensifikasi, dan intensifikasi. Lebih spesifik adalah upaya rehabilitasi lahan perkebunan secara optimal yang dikenal dengan kegiatan Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

Jenis tanaman perkebunan rakyat yang tercakup dalam kegiatan Sensus Pertanian 1993 meliputi tanaman karet, kelapa, kopi, cengkeh, coklat, kelapa sawit, lada, tembakau dan pala. Dalam pelaksanaan sensus tersebut di setiap kabupaten, jenis tanaman yang dicatat selain yang telah disebutkan, ditambah dua tanaman potensi di daerahnya. Adapun jenis tanaman yang dibahas secara khusus baik perkembangan jumlah rumahtangga yang mengusahakan maupun populasi pohonnya terbatas pada tiga tanaman, yaitu kelapa, kopi, dan cengkeh. Sedangkan pembahasan rumahtangga usaha perkebunan rakyat secara keseluruhan terbatas pada tahun 1993 saja.

Untuk membahas rumahtangga usaha perkebunan rakyat, bab ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab 6.1 membahas perkembangan rumahtangga usaha perkebunan menurut jenis tanaman dan membandingkan indikator ini antar kabupaten. Subbab 6.2 membahas perkembangan jumlah pohon menurut kabupaten. Perbandingan-perbandingan tersebut juga didasarkan kepada hasil Sensus Pertanian 1983 dan 1993.

#### **6.1. Perkembangan Rumahtangga Usaha Perkebunan Rakyat**

Total rumahtangga usaha perkebunan rakyat di Jawa Timur dari hasil Sensus Pertanian 1993 adalah sebesar 978 ribu lebih. Ternyata yang paling besar terdapat pada SWP VII (21,1 persen) atau sebanyak 206,7 ribu rumahtangga, kemudian SWP II 18,4 persen atau 180,1 ribu rumahtangga, SWP VIII 12,65 persen atau 123,7 ribu rumahtangga, serta untuk SWP lainnya berkisar antara 2,7

sampai dengan 10,5 persen Secara rinci data tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 1.

Tabel 6 2 memperlihatkan jumlah rumahtangga usaha perkebunan kelapa di Jawa Timur tahun 1993 turun hampir 30 persen dibandingkan dengan tahun 1983, yaitu dari 148,4 ribu pada tahun 1983 menjadi 104,7 ribu tahun 1993 Secara persentase penurunan terbesar terjadi pada SWP I (61,1 persen) dan yang terkecil SWP V (8,5 persen). Namun secara absolut penurunan terbesar pada SWP VII, yaitu dari 55,5 ribu rumahtangga tahun 1983 menjadi 37,4 ribu pada tahun 1993, berarti terjadi penurunan 18,1 ribu rumahtangga Sedangkan SWP I yang secara persentase mengalami penurunan terbesar, secara absolut relatif kecil (2,2 ribu rumahtangga), yaitu dari 3,6 ribu tahun 1983 menjadi 1,4 ribu rumahtangga tahun 1993. Dari sembilan SWP yang mengalami peningkatan hanya pada SWP II, dari 9,8 ribu rumahtangga tahun 1983 menjadi 12,9 rumahtangga tahun 1993 atau naik 31,2 persen

Khusus pada SWP yang mengalami penurunan jumlah rumahtangga usaha perkebunan, kemungkinan disebabkan oleh adanya pengurangan tanaman yang sudah tidak produktif lagi serta adanya peremajaan tanaman, yang hingga saat ini belum pernah berproduksi dan tidak tercatat dalam Sensus Pertanian 1993. Secara konsep-rumahtangga-rumahtangga tersebut tidak dikategorikan sebagai rumahtangga usaha perkebunan.

Beralih kepada perkebunan kopi, menurut data dari Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jawa Timur, separuh lebih perkebunan kopi diusahakan dalam skala perkebunan kopi rakyat, yang pada

hakekatnya adalah rumahtangga usaha tanaman kopi. Jenis rumahtangga tersebut di Jawa Timur tahun 1983 tercatat berjumlah hampir 73 ribu, dan menjadi 72 ribu rumahtangga pada tahun 1993, berarti ada penurunan hampir 2 persen. Penurunan ini barangkali karena antara lain pola pemasaran, rendahnya mutu kopi yang dihasilkan, serta disebabkan serangan hama penyakit.

Seperti halnya dengan jenis tanaman perkebunan lainnya, usaha tanaman cengkeh juga termasuk bukan merupakan pendapatan utama rumahtangga, akan tetapi biasanya sebagai usaha sampingan dari kegiatan pertanian. Usaha ini biasanya diperoleh dari warisan dan pengusahaannya pada saat sekarang hanya bersifat meneruskan saja sehingga menyebabkan pengembangan selanjutnya dari usaha ini cukup sulit. Hal lain yang memperburuk usaha perkebunan cengkeh adalah perkembangan harga yang kurang menguntungkan dan mengakibatkan rumahtangga enggan untuk mengembangkan usahanya.

Jumlah rumahtangga perkebunan cengkeh tahun 1993 mengalami penurunan hampir 11 persen dibanding keadaan pada tahun 1983. Angka absolut dari penurunan tersebut adalah 176,8 ribu rumahtangga menjadi 157,7 ribu rumahtangga. Apabila ditinjau menurut SWP, penurunan umumnya terjadi pada SWP-SWP yang total rumahtangga usaha perkebunan cengkeh relatif besar (Tabel 6.2). Penurunan jumlah rumahtangga usaha perkebunan cengkeh terjadi pada SWP VII (8,9 persen), yaitu dari 69,4 ribu rumahtangga menjadi 63,2 ribu rumahtangga. SWP VI mengalami penurunan sebesar 30,7 persen, yaitu dari 33,7 ribu rumahtangga menjadi 23,4 ribu

rumahtangga Data perubahan jumlah rumahtangga usaha perkebunan cengkeh pada SWP-SWP lain dapat dilihat pada tabel tersebut

## **6.2. Perkembangan Jumlah Pohon**

Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa jumlah tanaman kelapa di Jawa Timur tahun 1983 lebih dari 16 juta pohon, turun menjadi hampir 15 juta pada tahun 1993, atau turun sekitar 9 persen Walaupun secara keseluruhan Jawa Timur jumlahnya turun, tetapi dari 9 SWP, 2 SWP mengalami penambahan jumlah pohon, yaitu SWP II dan SWP IV masing-masing sebesar 57 persen dan 8 persen Secara absolut pada SWP II bertambah dari 1,1 juta pohon pada tahun 1983 menjadi 1,7 juta pohon pada tahun 1993 Sedangkan pada SWP IV, terjadi penambahan dari 1,1 juta pohon pada tahun 1983 menjadi 1,2 juta pohon pada tahun 1993 Jumlah populasi pohon pada SWP-SWP lainnya mengalami penurunan, secara berturut-turut penurunan tersebut adalah SWP I (29 persen), SWP VIII (21 persen), SWP VI dan SWP VII (15 persen), SWP IX (13 persen), SWP III (10 persen), dan SWP V (5 persen)

Tidak seperti halnya pada tanaman kelapa, populasi tanaman kopi selama kurun waktu antar dua sensus pertanian mengalami kenaikan sebesar 5 persen, dari sekitar 45 juta pohon menjadi 47 juta pohon pada tahun 1993. Sedangkan jumlah rumahtangga usaha tanaman kopi menurun, sehingga rata-rata jumlah tanaman kopi per rumahtangga naik

Menurut SWP, perkembangan populasi tanaman kopi yang cukup mencolok antara dua sensus pertanian (1983 dan 1993) terjadi pada

SWP II (94 persen) kemudian SWP VIII (71 persen), dan SWP IV (51 persen) Perkembangan populasi tanaman kopi pada seluruh SWP-SWP dapat dilihat pada Tabel 6.3

Sejalan dengan penurunan jumlah rumahtangga yang mengusahakan tanaman cengkeh (hampir 11 persen), populasi tanaman cengkeh juga menurun. Faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain oleh adanya anggapan bahwa usaha tersebut sudah tidak menguntungkan lagi dari segi ekonomis. Penurunan populasi tanaman cengkeh terjadi pada SWP-SWP I, III, IV, V, VI, dan IX, dengan tingkat penurunan berkisar antara 29 persen sampai dengan 55 persen. Sementara populasi tanaman cengkeh pada SWP-SWP lainnya mengalami pertambahan jumlah, bahkan pada SWP II naik sangat tajam (2.826 persen), walaupun secara absolut pada Tabel 6.3 angka tersebut bergerak dari nilai yang kecil (0,6 ribu menjadi 17,2 ribu pohon).

**Tabel 6.1**  
**Rumahtangga Usaha Perkebunan Rakyat**  
**Menurut SWP (Tanpa Kotamadya), Tahun 1993**

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Jumlah Rumahtangga	Persentase
(1)	(2)	(3)
I	89 172	9,11
II	180 067	18,40
III	26 376	2,70
IV	101 754	10,40
V	54 783	5,60
VI	102 350	10,46
VII	206 687	21,13
VIII	123 748	12,65
IX	93 443	9,55
<b>Jawa Timur</b>	<b>978 380</b>	<b>100,00</b>

**Catatan:**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan,  
Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto,  
Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan,  
Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar,  
Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk,  
Kod Kediri, Kod. Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun,  
Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

Tabel 6 2  
Perkembangan Rumahtangga Perkebunan Rakyat Menurut  
SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Tanaman, Tahun 1983 - 1993

SWP	Kelapa			Kopi			Cengkeh		
	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	3 611	1 406	-61,06	105	86	-18,10	773	821	6,21
II	9 837	12 910	31,24	15	10	-33,33	33	315	854,55
III	21 981	15 098	-31,31	5 347	5 465	2,21	8 995	6 324	-29,69
IV	9 124	7 145	-21,69	10 145	13 051	28,64	485	300	-38,14
V	5 337	4 881	-8,54	11 786	9 559	-18,90	9 872	5 241	-46,91
VI	14 021	9 364	-33,21	35 638	31 876	-10,56	33 706	23 361	-30,69
VII	55 517	37 374	-32,68	9 122	9 391	2,95	69 369	63 217	-8,87
VIII	23 019	13 426	-41,67	1 185	2 649	123,54	53 544	58 133	8,57
IX	5 972	3 106	-47,99	5	5	0,00	64	4	-93,75
<b>Sub Jumlah</b>	148 419	104 710	-29,45	73 348	72 092	-1,71	176 841	157 716	-10,81
<b>Kotamadya</b>	660	244	-63,03	204	51	-75,00	551	33	-94,01
<b>Jawa Timur</b>	149 079	104 954	-29,60	73 552	72 143	-1,92	177 943	157 782	-11,33



**Catatan:**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II . Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV . Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab. Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

**Tabel 6 3**  
**Perkembangan Jumlah Pohon Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) dan Jenis Tanaman,**  
**Tahun 1983 - 1993**

S W P	Kelapa			Kopi			Cengkeh		
	1983	1993	%	1983	1993	%	1983	1993	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	657 772	466 689	-29,05	68 449	95 915	40,13	69 925	43 087	-38,38
II	1 103 918	1 734 831	57,15	10 861	21 089	94,17	588	17 205	2826,02
III	2 047 176	1 839 591	-10,14	3 752 887	3 813 431	1,61	404 149	272 212	-32,65
IV	1 144 347	1 235 548	7,97	6 576 716	9 907 628	50,65	35 177	16 040	-54,40
V	726 613	688 305	-5,27	7 683 880	7 069 393	-8,00	540 017	277 810	-48,55
VI	1 540 398	1 302 362	-15,45	19 494 553	17 599 538	-9,72	2 155 102	1 275 258	-40,83
VII	5 587 114	4 725 842	-15,42	5 661 760	6 205 131	9,60	2 686 811	2 696 496	0,36
VIII	2 754 669	2 178 290	-20,92	1 182 216	2 017 883	70,69	2 033 266	2 419 055	18,97
IX	884 889	766 833	-13,34	2 009	1 824	-9,21	3 459	2 432	-29,69
<b>Sub Jumlah</b>	16 446 896	14 938 291	-9,17	44 433 331	46 731 832	5,17	7 928 494	7 019 625	-11,46
<b>Kotamadya</b>	238 233	61 893	-74,02	270 714	104 996	-61,22	330 194	12 052	-96,35
<b>Jawa Timur</b>	16 685 129	15 000 184	-10,10	44 704 045	46 836 828	4,77	8 258 688	7 031 677	-14,86

**Catatan**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

**Catatan:**

- SWP I Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
- SWP III Kab Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab. Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod Probolinggo
- SWP VI Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kod Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod Madiun
- SWP IX Kab Bojonegoro, Kab Tuban

## **BAB VII. USAHA PERIKANAN**

Bab ini membahas rumahtangga yang berusaha di bidang budidaya ikan di kolam air tawar/sawah, air payau, penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. Pembahasannya disajikan ke dalam tiga subbab. Subbab 7.1 membahas usaha budidaya ikan di kolam air tawar/sawah menurut daerah, termasuk juga mengenai rata-rata luas kolam/sawah yang dikuasai rumahtangga yang melakukan usaha di bidang ini. Subbab 7.2 membahas dua hal pokok, yaitu rumahtangga usaha budidaya tambak air payau menurut daerah, dan rata-rata luas tambak yang dikuasai rumahtangga budidaya ikan di tambak. Subbab 7.3 membahas perkembangan rumahtangga usaha penangkapan ikan di laut dan di perairan umum.

### **7.1. Rumahtangga Usaha Budidaya Ikan di Kolam Air Tawar/Sawah**

Tabel 7.1 memperlihatkan luas dan rata-rata luas kolam air tawar/sawah yang dikuasai rumahtangga. Dengan jumlah rumahtangga usaha budidaya ikan di kolam air tawar/sawah sebanyak hampir 30 ribu rumahtangga dan luas kolam hanya 818 hektar, rata-rata penguasaan kolam hanya 0,03 hektar per rumahtangga. Meskipun secara keseluruhan rata-rata luas penguasaan kolam air tawar/sawah di Jawa Timur sangat rendah, ternyata minat masyarakat untuk mulai membudidayakan ikan di kolam air tawar/sawah sudah tinggi. Terbukti bahwa usaha budidaya ikan di kolam air tawar/sawah ini sudah menyebar di setiap kabupaten, dan

kenyataan di lapangan memberi gambaran bahwa hampir di setiap tempat dengan mudah dapat ditemukan hasil budidaya ini, misalnya ikan lele, mujair, dan tombro.

Rata-rata tertinggi luas kolam air tawar/sawah per rumahtangga usaha adalah di Kabupaten Bangkalan, seluas 1,32 hektar. Hal ini tidak berarti bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan daerah potensi ikan air tawar/sawah, karena perbandingan jumlah rumahtangga yang mengusahakan dengan total luas kolamnya relatif kecil. Kabupaten lain yang mempunyai rata-rata luas kolam air tawar/sawah cukup tinggi adalah Kabupaten Gresik (0,71 hektar) dan Kabupaten Tuban (0,50 hektar), dengan luas kolam 151 hektar dan 105 hektar. Kabupaten Lamongan yang mempunyai luas kolam cukup tinggi, yaitu 120,9 hektar dan jumlah rumahtangga yang mengusahakan cukup banyak, maka luas rata-rata per rumahtangga usaha menjadi kecil. Menurut data dari Dinas Perikanan Jawa Timur yang diterbitkan dalam Jawa Timur Dalam Angka 1992, tiga kabupaten terakhir merupakan penghasil ikan air tawar/sawah terbesar di Jawa Timur.

## **7.2. Rumahtangga Budidaya Ikan di Tambak Air Payau**

Tabel 7.2 memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah pantai utara dan timur di Propinsi Jawa Timur dimanfaatkan untuk usaha budidaya ikan di tambak air payau. Dari data tersebut, hal yang menarik adalah bahwa di Kabupaten Malang juga terdapat rumahtangga yang mengusahakan budidaya ikan tambak air payau. Meskipun rata-rata penguasaan tambak di kabupaten tersebut

tertinggi, yaitu 8,75 hektar, tetapi usaha ini kurang populer. Terbukti bahwa hanya 12 rumahtangga saja yang mengusahakannya dari 105 hektar lahan tambak yang diusahakan.

Daerah pantai yang cukup berpotensi dalam usaha tambak air payau adalah Kabupaten Lamongan (17 ribu hektar lebih), Kabupaten Gresik (16 ribu hektar lebih) dan Kabupaten Sidoarjo (13 ribu hektar lebih). Tiga kabupaten tersebut selama ini memang dikenal sebagai daerah penghasil ikan bandeng dan udang yang cukup besar di Jawa Timur. Sedangkan daerah pantai yang lain yaitu Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, Bangkalan, dan Sampang meskipun tidak terlalu tinggi luas areal tambaknya, masih mempunyai peluang untuk lebih dikembangkan dengan teknologi yang lebih tinggi. Kondisi geografisnya memungkinkan untuk pengembangan tersebut.

Pengembangan subsektor perikanan sejalan dengan sasaran Pelita VI Propinsi Jawa Timur yang akan meningkatkan ekspor komoditi perikanan, terutama jenis udang segar beku.

### **7.3. Perkembangan Rumahtangga Usaha Penangkapan Ikan Laut dan Perairan Umum 1983-1993**

Usaha penangkapan ikan di laut oleh rumahtangga umumnya dilakukan oleh rumahtangga yang tempat tinggalnya berbatasan dengan pantai. Kenyataan ini sesuai dengan tingkat teknologi penangkapan ikan yang digunakan oleh anggota rumahtangga usaha. Ketergantungan dengan faktor musim biasanya sangat tinggi, apalagi dengan sarana penangkapan ikan yang masih tradisional,

usaha ini mengandung resiko keselamatan dan kerugian yang tidak ringan.

Berbeda dengan usaha penangkapan ikan di laut, kegiatan penangkapan ikan di perairan umum mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Dari beberapa pengamatan kegiatan ini umumnya merupakan kegiatan sampingan dari rumahtangga, khususnya rumahtangga pertanian, yang biasanya dilakukan pada saat kegiatan pertanian lainnya sedang istirahat, seperti saat menunggu musim tanam berikutnya atau menunggu saat panen. Disamping sifat usahanya yang merupakan sampingan, areal untuk penangkapan ikan juga terbatas, sehingga tidak ekonomis untuk diusahakan secara komersial.

Gambaran mengenai perubahan populasi rumahtangga nelayan/penangkap ikan di laut dan perairan umum saat pendaftaran rumahtangga pada Sensus Pertanian 1983 dan Sensus Pertanian 1993 disajikan pada Tabel 7.3. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi penurunan jumlah rumahtangga sekitar 2 persen, yaitu dari sekitar 92 ribu menjadi 90 ribu rumahtangga. Kurang sesuainya *cost and benefit ratio*, menyebabkan jumlah rumahtangga yang bergerak dalam usaha ini kurang berkembang.

Kalau diamati perubahan jumlah rumahtangga nelayan/penangkap ikan di laut menurut Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), tampak variasi yang relatif besar antara perubahan di suatu SWP dibandingkan dengan SWP yang lain. Demikian juga gambaran perubahan jumlah rumahtangga penangkap ikan di perairan umum,

perubahan di suatu SWP berbeda relatif besar dibanding keadaan di SWP lainnya. Namun demikian secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah rumahtangga penangkap ikan di perairan umum sebesar hampir 26 persen, selama kurun 1983 sampai dengan 1993.

**Tabel 7.1**  
**Luas dan Rata-rata Luas Kolam Air Tawar/Sawah**  
**yang Dikuasai Rumahtangga Budidaya Ikan**  
**Menurut Kabupaten, Tahun 1993**

Kabupaten	Luas Kolam Air Tawar/Sawah (Ha)	Rumahtangga Kolam Air Tawar/Sawah	Rata-rata Luas Kolam Air Tawar/Sawah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	1,34	331	0,00
02. Ponorogo	2,29	302	0,01
03. Trenggalek	3,61	1.303	0,00
04. Tulungagung	51,61	6.744	0,01
05. Blitar	63,40	5.974	0,01
06. Kediri	68,82	3.839	0,02
07. Malang	6,90	750	0,01
08. Lumajang	6,90	332	0,02
09. Jember	25,67	2.161	0,01
10. Banyuwangi	16,74	653	0,03
11. Bondowoso	3,82	505	0,01
12. Situbondo	0,71	68	0,01
13. Probolinggo	0,44	61	0,01
14. Pasuruan	6,93	148	0,05
15. Sidoarjo	4,42	458	0,01
16. Mojokerto	1,48	368	0,00
17. Jombang	25,05	792	0,03
18. Nganjuk	15,86	780	0,02
19. Madiun	3,28	783	0,00
20. Magetan	1,09	290	0,00
21. Ngawi	6,21	992	0,01
22. Bojonegoro	48,72	475	0,10
23. Tuban	105,27	209	0,50
24. Lamongan	120,90	930	0,13
25. Gresik	150,70	211	0,71
26. Bangkalan	75,17	57	1,32
27. Sampang	0,10	43	0,00
28. Pamekasan	0,06	26	0,00
29. Sumenep	0,54	12	0,05
<b>Subjumlah</b>	<b>818,02</b>	<b>29.597</b>	<b>0,03</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>19,48</b>	<b>562</b>	<b>0,03</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>837,50</b>	<b>30.159</b>	<b>0,03</b>



**Tabel 7.2**  
**Luas dan Rata-rata Luas Tambak Air Payau**  
**yang Dikuasai Rumah tangga Budidaya Ikan**  
**Menurut Kabupaten, Tahun 1993**

Kabupaten	Luas Tambak Air Payau (Ha)	Rumah tangga Tambak Air Payau	Rata-rata Luas Tambak Air Payau (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	0,00	0	0,00
02. Ponorogo	0,00	0	0,00
03. Trenggalek	0,00	0	0,00
04. Tulungagung	0,00	0	0,00
05. Blitar	0,00	0	0,00
06. Kediri	0,00	0	0,00
07. Malang	105,00	12	8,75
08. Lumajang	0,00	0	0,00
09. Jember	10,84	17	0,64
10. Banyuwangi	105,30	30	3,51
11. Bondowoso	0,00	0	0,00
12. Situbondo	371,16	113	3,28
13. Probolinggo	14,97	530	0,03
14. Pasuruan	2 042,05	755	2,70
15. Sidoarjo	13.500,95	1.817	7,43
16. Mojokerto	15,00	5	3,00
17. Jombang	10,00	4	2,50
18. Nganjuk	0,00	0	0,00
19. Madiun	0,00	0	0,00
20. Magetan	0,00	0	0,00
21. Ngawi	0,00	0	0,00
22. Bojonegoro	0,00	0	0,00
23. Tuban	168,70	143	1,18
24. Lamongan	17 151,18	19.321	0,89
25. Gresik	16.106,28	7.480	2,15
26. Bangkalan	1 602,36	589	2,72
27. Sampang	2.986,77	1.171	2,55
28. Pamekasan	57,00	18	3,17
29. Sumenep	633,39	858	0,74
<b>Subjumlah</b>	<b>54.880,89</b>	<b>32.863</b>	<b>1,67</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>5.450,60</b>	<b>1.633</b>	<b>3,34</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>60.331,49</b>	<b>34.496</b>	<b>1,75</b>

**Tabel 7.3**  
**Perkembangan Rumahtangga Nelayan Penangkap Ikan**  
**Menurut SWP (Tanpa Kotamadya) Tahun 1983-1993**

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Rumahtangga Nelayan/Penangkap Ikan					
	Laut			Perairan Umum		
	1983	1993	%	1983	1993	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	18 418	17 925	-2,68	5 761	9 966	72,99
II	30 309	33 393	10,18	1 066	718	-32,65
III	10 795	5 934	-45,03	80	299	273,75
IV	10 398	8 128	-21,83	1 044	1 267	21,36
V	5 503	7 483	35,98	489	804	64,42
VI	6 371	4 675	-26,62	1 989	2 692	35,34
VII	1 203	3 302	174,48	3 890	2 653	-31,80
VIII	936	1 617	72,76	695	1 538	121,29
IX	3 875	4 598	18,66	2 718	2 312	-14,94
<b>Sub-jumlah</b>	<b>87 808</b>	<b>87 055</b>	<b>-0,86</b>	<b>17 732</b>	<b>22 249</b>	<b>25,47</b>
<b>Kotamadya</b>	<b>4 014</b>	<b>2 737</b>	<b>-31,81</b>	<b>77</b>	<b>180</b>	<b>133,77</b>
<b>Jawa Timur</b>	<b>91 822</b>	<b>89 792</b>	<b>-2,21</b>	<b>17 809</b>	<b>22 429</b>	<b>25,94</b>

**Catatan.**

- SWP I : Kab Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kod Mojokerto, Kod Surabaya
- SWP II . Kab. Sampang, Kab Pamekasan, Kab. Sumenep
- SWP III Kab. Banyuwangi
- SWP IV Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab. Situbondo
- SWP V Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kod. Probolinggo
- SWP VI . Kab Malang, Kab Pasuruan, Kod Pasuruan, Kod Malang
- SWP VII . Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab Blitar, Kab. Kediri, Kab Jombang, Kab. Nganjuk, Kod. Kediri, Kod Blitar
- SWP VIII . Kab Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, Kod. Madiun.
- SWP IX . Kab Bojonegoro, Kab. Tuban.

## BAB VIII. RINGKASAN DAN KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disajikan ke dalam Bab 1 sampai dengan Bab 7, selanjutnya dapat dibuat ikhtisar dan kesimpulan yang diberikan pada bab ini

Dari jumlah rumahtangga di Propinsi Jawa Timur, 59 persen diantaranya merupakan rumahtangga pertanian, dan dari jumlah tersebut 96 persen merupakan rumahtangga tani pengguna lahan. Distribusi penyebaran rumahtangga tani tersebut bervariasi antar kabupaten

Berdasarkan total rumahtangga PPL, sekitar 84 persen diantaranya mengusahakan tanaman padi dan palawija, dengan tingkat penyebaran yang relatif merata di setiap kabupaten. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah tingkat kepastian penjualan komoditi tersebut yang disertai dengan harga jual yang tidak fluktuatif. Kondisi pemasaran tersebut tidak lepas dari kebijaksanaan pemerintah mengenai swasembada pangan (beras).

Penguasaan luas lahan sawah rata-rata per rumahtangga usaha padi/palawija hanya 0,25 Ha, kenyataan ini menuntut Propinsi Jawa Timur untuk dapat panen dua kali setahun apabila tetap ingin menjaga swasembada beras, karena dari target luas panen tahunan sebesar 1,6 juta ha luas lahan yang tersedia hanya 860 ribu ha. Kabupaten-kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Jember, dan Banyuwangi merupakan daerah yang mempunyai lahan sawah terluas yang sekaligus sebagai lumbung beras Jawa Timur.

Pertambahan rumahtangga usaha padi/palawija mencapai 0,5 persen setahun. Apabila angka tersebut dibandingkan dengan tingkat kenaikan produksi rata-rata setahun dalam periode yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan produktifitas padi/palawija per rumahtangga tani, karena tingkat kenaikan produksi lebih besar dibanding tingkat pertambahan jumlah rumahtangga taninya.

Di Kabupaten-kabupaten Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Kediri (pesisir selatan), terjadi penurunan jumlah rumahtangga tani padi/palawija. Salah satu penyebab dari penurunan tersebut adalah kebijaksanaan alih fungsi tanaman padi/palawija ke tanaman tebu yang dikenal dengan istilah **glebakan**. Alih fungsi lahan juga terjadi dari areal tanaman padi/palawija ke penggunaan untuk industri, terutama terjadi di Kabupaten-kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto sebagai desakan sektor industri di lingkaran Surabaya.

Golongan rumahtangga tani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha mencapai 69 persen. Kabupaten Pacitan dan Sidoarjo merupakan daerah di mana rata-rata penguasaan lahan per rumahtangga tani paling tinggi, namun dilihat dari penyebab besarnya penguasaan tanah, antara dua kabupaten tersebut adalah berbeda. Penyebab tingkat penguasaan tanah per rumahtangga tani yang relatif luas di Kabupaten Pacitan dikarenakan total areal lahannya cukup luas dibanding jumlah rumahtangga taninya, sedangkan di Sidoarjo, diduga terjadi penyewaan tanah dari petani gurem ke petani yang "profesional", kemudian petani gurem "pindah" kerja ke sektor industri. Indikator yang mendasari

dugaan ini adalah persentase luas lahan yang berasal dari pihak lain cukup besar

Rumahtangga pertanian bukan pengguna lahan pada umumnya bergerak di bidang usaha pemungutan hasil hutan dan penangkapan satwa liar. Anggota rumahtangga yang bergerak dalam usaha ini umumnya kurang memperoleh ketrampilan untuk dapat "masuk" ke bidang usaha lainnya yang mensyaratkan kualifikasi tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga terpaksa bertahan dalam usaha tersebut

Tanaman hortikultura yang cukup banyak diusahakan adalah nenas, terutama di Kabupaten-kabupaten Kediri dan Blitar. Daerah-daerah ini memang dikenal sebagai daerah produsen nenas. Selain tanaman tersebut, bawang merah juga banyak ditanam, terutama di Kabupaten-kabupaten Kediri, Malang, Probolinggo, dan Nganjuk.

Dalam kelompok usaha ternak besar, sapi perah menjadi usaha yang jumlah rumahtangga usahanya berkembang pesat. Dalam usaha ternak ini, rumahtangga yang paling banyak mengusahakannya terletak di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI. Sapi (bukan sapi perah) juga merupakan ternak yang banyak diusahakan oleh rumahtangga pertanian.

Walaupun sumbangan subsektor perkebunan rakyat dalam perekonomian Propinsi Jawa Timur cukup besar (3,53 persen menurut harga berlaku dan 2,44 persen atas dasar harga konstan 1983), namun pengusahaannya belum intensif. Kesimpulan ini didasarkan kepada kenyataan bahwa usaha perkebunan rakyat hanya merupakan

usaha sampingan bagi rumahtangga pertanian, bahkan jumlah tanaman kelapa dan cengkeh cenderung turun apabila dilihat dari data sensus pertanian (1983 dan 1993) Dalam usaha perkebunan rakyat, tanaman kopi cenderung naik populasinya

Meskipun secara keseluruhan rata-rata luas penguasaan kolam air tawar di Propinsi Jawa Timur sangat rendah, namun ternyata minat masyarakat untuk mulai membudidayakan ikan di kolam air tawar/sawah sudah menggembarakan Dugaan tersebut dibuktikan oleh gambaran distribusi rumahtangga yang membudidayakannya Budidaya ikan di kolam air tawar/sawah telah menyebar di setiap kabupaten Rata-rata pengusaha ikan di kolam air tawar/sawah yang terluas terletak di Kabupaten-kabupaten Bangkalan dan Gresik

Daerah pantai yang cukup berpotensi dalam usaha tambak air payau adalah Kabupaten-kabupaten Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo Selain letak geografisnya yang menguntungkan, tiga daerah ini memang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil ikan bandeng dan udang yang cukup besar di daerah Jawa Timur